PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Tahun 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK

2025

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Tahun 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK

2025

PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

Judul: **RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

Penanggungjawab:

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik

2025

kata pengantar

Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan. Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gresik di bidang penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 53 tahun 2020. Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gresik ini dimaksudkan untuk: merumuskan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan dan memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, selain itu dokumen RPKD ini juga bertujuan untuk membangun konsensus bersama dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar (*right*

based approach) serta pendekatan partisipatif dan kemitraan dalam perumusan kebijakan dan strategi; menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs, menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pihak swasta yang berkomitmen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, serta mengakomodir permasalahan kemiskinan multidimensional di Kabupaten Gresik.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Masyarakat miskin diakui memiliki hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen RPKD didasarkan atas pendekatan pemberdayaan berbasis hak.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada proses penyusunan dokumen RPKD ini, kami mengucapkan terima kasih, semoga dengan tersusunnya dokumen RPKD ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan yang lebih memihak kepada masyarakat miskin di Kabupaten Gresik.

Gresik, 15 September 2025
Wakil Bupati Gresik
Selaku
Ketua TKPK Kabupaten Gresik

dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M., M.H.P

daftar isi

Halaman:

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iv
Daftar Gambar vii
Daftar Tabel ix
Daftar Istilah x

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 5
1.3. Landasan Hukum 6
1.4. Metodologi 11
1.4.1. Jenis dan Sumber Data 13
1.4.2. Metode Analisis Data 13
1.4.3. Tahapan Penyusunan RPKD 13
1.5. Sistematika RPKD 22

Bab II Gambaran Umum Kabupaten Gresik 23
2.1. Geografi dan Adminstrasi Wilayah 23
2.2. Penduduk dan Ketenagakerjaan 27
2.3. Ekonomi Daerah 32

Bab III Profil Kemiskinan Kabupaten Gresik 39
3.1. Pengertian dan Konsep Kemiskinan 39
3.2. Kondisi Kemiskinan Makro 58
3.2.1. Garis Kemiskinan 58
3.2.2. Jumlah Penduduk Miskin 60
3.2.3. Persentase Penduduk Miskin 61

DAFTAR ISI

3.2.4. Indek Kedalaman Kemiskinan 62
3.2.5. Indek Keparahan Kemiskinan 64
3.2.6. Kemiskinan Ekstrem Indek Kedalaman Kemiskinan . 65
3.3. Kondisi Bidang-Bidang terkait Isu Kemiskinan 68
3.3.1. Bidang Pendidikan 69
3.3.2. Bidang Kesehatan 72
3.3.3. Bidang Ketenagakerjaan 76
3.3.4. Bidang Infrastruktur Dasar 78
3.3.5. Bidang Ketahanan Pangan 81
3.4. Prioritas Intervensi 83

Bab IV Prioritas Peogram dan Lokasi Prioritas 88
4.1. Analisa Akar Masalah 88
4.1.1. Kemiskinan Makro 89
4.1.2. Bidang-Bidang terkait Isu Kemiskinan 92
4.2. Analisa Lokasi Prioritas 106
4.2.1. Rumah Tangga dan Individu Miskin 107
4.2.2. Bidang-Bidang terkait Isu Kemiskinan 110
4.3. Analisa Fiskal Daerah 117

Bab V Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik 122
5.1. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik 124
5.1.1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan 125
5.1.2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 127
5.2. Prinsip, Pendekatan, dan Tahapan Penanggulangan Kemiskinan 130
5.2.1. Prinsip Penanggulangan Kemiskinan 130
5.2.2. Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan 131
5.2.3. Tahapan Penanggulangan Kemiskinan 132
5.3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 134

Bab VI Sistem Monitoring dan Evaluasi 146
6.1. Mekanisme dan Prosedur 149
6.2. Indikator Kinerja 160
6.3. Penanganan Pengaduan Masyarakat 161

Bab VII Penutup 163

Daftar Pustaka

Lampiran - Lampiran

daftar gambar

Halaman:

Gambar 1.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 2015-2024	2
Gambar 1.2.	Lima Pertanyaan Analisa dalam Penyusunan RPKD	12
Gambar 1.3.	Tahapan Proses Penyusunan Dokumen RPKD	14
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gresik	27
Gambar 2.2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024...	28
Gambar 2.3.	Persentase Penduduk Kabupaten Gresik berdasar Kelompok Usia	30
Gambar 2.4.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024	36
Gambar 3.1.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik	59
Gambar 3.2.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kab Gresik	60
Gambar 3.3.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kab Gresik	61
Gambar 3.4.	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2024	62
Gambar 3.5.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab Gresik	63
Gambar 3.6.	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2024	64
Gambar 3.7.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab Gresik	64
Gambar 3.8.	Posisi Relatif Indeks Jeparahan Kemiskinan Kab Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2024	65
Gambar 3.9.	Perkembangan Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Naional	67
Gambar 3.10.	Prioritas Intervensi terhadap Indikator Bidang dengan Kualifikasi Lebih Tinggi / Meningkat	85
Gambar 3.11.	Prioritas Intervensi terhadap Indikator Bidang dengan Kualifikasi Lebih Rencah / Menurun	86

Gambar 4.1. Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Miskin Usia 15 th ke atas Kab. Gresik 91
Gambar 4.2. Teori Perubahan (TOC) untuk Penurunan Angka Kemiskinan 92
Gambar 4.3. Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-18 Th Kab Gresik .. 93
Gambar 4.4. Teori Perubahan (TOC) untuk Bidang Pendidikan 95
Gambar 4.5. Teori Perubahan (TOC) untuk Bidang Kesehatan 97
Gambar 4.6. Teori Perubahan (TOC) untuk Bidang Ketenagakerjaan ... 99
Gambar 4.7. Teori Perubahan (TOC) untuk Bidang Infrastruktur Dasar 101
Gambar 4.8. Teori Perubahan (TOC) untuk Bidang Ketahanan Pangan . 104
Gambar 4.9. Analisis Penyebab dan Akar Penyebab Kemiskinan 106
Gambar 4.10. Sebaran Lokasi Prioritas Keluarga Miskin 108
Gambar 4.11. Sebaran Lokasi Prioritas Individu/Penduduk Miskin 109
Gambar 4.12. Sebaran Lokasi Prioritas Anak Usia 7-12 Tahun Tidak Bersekolah 111
Gambar 4.13. Sebaran Lokasi Prioritas Anak Usia 13-15 Tahun Tidak Bersekolah 111
Gambar 4.14. Sebaran Lokasi Prioritas Balita Gizi Buruk 112
Gambar 4.15. Sebaran Lokasi Prioritas Balita Stunting 113
Gambar 4.16. Sebaran Lokasi Prioritas Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja 114
Gambar 4.17. Sebaran Lokasi Prioritas Individu Usia 15-59 Tahun sebagai Petani 114
Gambar 4.18. Sebaran Lokasi Prioritas Individu Usia 15-59 Tahun sebagai Nelayan 115
Gambar 4.19. Sebaran Lokasi Prioritas Keluarga tanpa Kepemilikan Rumah 116
Gambar 4.20. Sebaran Lokasi Prioritas Keluarga tanpa Akses Air Minum Layak 116
Gambar 4.21. Sebaran Lokasi Prioritas Keluarga tanpa Jamban 117
Gambar 4.22. Perkembangan Ruang Fiskal 2022-2024 Kab. Gresik 118
Gambar 4.23. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022-2024 (dalam %) 121

Gambar 5.1. Penanganan Akar Penyebab dan Penyebab Kemiskin 123
Gambar 5.2. Model Pendekatan Penta Helix dalam Penanggulangan Kemiskin 126
Gambar 5.3. Siklus Tahapan Penanggulangan Kemiskinan 133

Gambar 6.1. Bagan Alur Pelaporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (sebagai bagian dari Monitoring dan Evaluasi) ... 153
Gambar 6.2. Bagan Alur Pengorganisasian Monitoring dan Evaluasi ... 159

daftar tabel

Halaman:

Tabel 1.1. Indikator Bidang Terkait Isu Kemiskinan 17

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah 25
Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan Tahun 2024 29
Tabel 2.3. Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Tahun 2022-2024 32
Tabel 2.4. Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Gresik, Tahun 2023-2024 33
Tabel 2.5. PRDB dan PDRB per Kapita Kab Gresik Tahun 2020-2023 .. 38

Tabel 3.1. Variabel Kesejahteraan Masyarakat beserta Indikator Utama yang diperkirakan mempengaruhi Kemiskinan 57
Tabel 3.2. Perkembangan Capaian Kinerja P0, P1, P2, dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik 68
Tabel 3.3. Perkembangan Capaian Indikator Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024 70
Tabel 3.4. Posisi Relatif Capaian Indikator Bidang Pendidikan, Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2024 71
Tabel 3.5. Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 73
Tabel 3.6. Posisi Relatif Capaian Indikator Bidang Kesehatan, Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2024 75
Tabel 3.7. Perkembangan Capaian Indikator Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 76
Tabel 3.8. Posisi Relatif Capaian Indikator Bidang Ketenagakerjaan, Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2024 77

Tabel 3.9. Perkembangan Capaian Indikator Bidang Infrastruktur Dasar Tahun 2020-2024 79
Tabel 3.10. Posisi Relatif Capaian Indikator Bidang Ketahanan Pangan, Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2024 80
Tabel 3.11. Perkembangan Capaian Indikator Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024 81
Tabel 3.12. Posisi Relatif Capaian Indikator Bidang Ketahanan Pangan, Kab. Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2023 ... 82

Tabel 4.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kab. Gresik menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran 90
Tabel 4.2. Perkembangan Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2022-2024 (dalam Juta Rupiah) 119

Tabel 5.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. 135

Tabel 6.1. Komplementaris Monitoring dan Evaluasi 147
Tabel 6.2. Target Kinerja Kemiskinan Makro 161

daftar singkatan

AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKBa	:	Angka Kematian Balita
AKI	:	Angka Kematian Ibu
AKN	:	Angka Kematian *Neo-Natal*
AMH	:	Angka Melek Huruf
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
APS	:	Angka Putus Sekolah
APtS	:	Angka Partisipasi Sekolah
ARG	:	Anggaran Responsif Gender
ART	:	Anggota Rumah Tangga
BPS	:	Badan Pusat Statistik
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda Litbang	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPNT	:	Bantuan Pangan Non Tunai
BP Taskin	:	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
CSR	:	*Corporate Social Responsibility*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DBHCT	:	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
FGD	:	*Focus Group Discussion*
HLS	:	Harapan Lama Sekolah

Inpres	:	Instruksi Presiden
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
KB	:	Keluarga Berencana
KPM	:	Kelompok Penerima Manfaat
LP2KD	:	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
MA	:	Madrasah Aliyah
MI	:	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	:	Madrasah Tsanawiyah
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
P3KE	:	Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
Perpres	:	Peraturan Presiden
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PoU	:	*Prevalence of Undernourishment*
PP	:	Peraturan Pemerintah
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAT	:	Rencana Aksi Tahunan
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	:	Rata-Rata Lama Sekolah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPKD	:	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SD	:	Sekolah Dasar
SDGs	:	*Sustainable Development Goals*
SMA	:	Sekolah Menengah Atas

SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
Ruta	:	Rumah Tangga
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TKK	:	Tingkat Kesempatan Kerja
TKPK	:	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	:	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
UHH	:	Usia Harapan Hidup

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah

1 Pendahuluan

dokumen

RPKD 2025-2029
Kabupaten Gresik

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit terurai bak lingkaran setan. Benih-benih kemiskinanpun masih tumbuh dan berkembang di antara ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, kondisi ini merupakan potret rakyat kecil di Indonesia. Mereka tertatih-tatih membiayai hidup yang semakin mahal di tengah himpitan ekonomi dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Meski secara statistik jumlah rakyat miskin menurun, tetapi benarkah secara riil rakyat miskin berkurang?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang di rilis berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 50/07/Th. XXVII, 1 Juli 2024, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, turun sebesar 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan turun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir yakni pada Maret 2015 sampai dengan Maret 2024, kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase,

dengan perkecualian pada Maret 2020, dan Maret 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Perkembangan tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2015 sampai dengan Maret 2025 sebagaimana disajikan pada gambar grafik berikut.

Gambar 1.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia,
Tahun 2015 – 2025

Sumber: *Publikasi BPS*

Dalam menghadapi persoalan kemiskinan di Indonesia saat ini, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, mencantumkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu kinerja utama. Pengentasan kemiskinan masuk

dalam Asta Cita, khususnya dalam poin keenam yang berbunyi "Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan".

Asta Cita ini menjadi fokus utama dalam pemerintahan dengan target penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2026 dan kemiskinan menjadi 5% pada tahun 2029. Sebagai bentuk kesatuan perencanaan pembangunan. Pengentasan kemiskinan juga telah menjadi prioritas pembangunan serta telah dirumuskan menjadi indikator kinerja utama atau tolak ukur keberhasilan pembangunan Daerah dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pada konteks Kabupaten Gresik, tingkat kemiskinan merupakan salah indikator kinerja utama sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 serta pada Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Secara normatif, Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka

meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanahkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan bertugas:

a) menyusun rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan; dan
b) memastikan program sekolah rakyat tercantum dalam rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan.

Amanah ini berlaku dalam jenjang pemerintah Daerah dimana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) juga melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan denganmenyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Mengacu perihal di atas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik untuk tahun ini melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

1.2. **Maksud dan Tujuan**.

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus mewujudkan keselarasan penanggulangan kemiskinan dan program-program penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.

Adapun tujuan pekerjaan ini yang berupa dokumen kebijakan penanggulangan kemiskinan 5 tahunan bertujuan untuk:

1) secara normatif, menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2024 perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015

Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

2) secara subtansial sebagai rencana lintas sektoral dalam penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik dan selaras dengan rencana sektoral lainnya;
3) secara substansial sebagai dokumen kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik secara sistematis, terencana, dan bersinergi pada Tahun 2025-2029;
4) secara substansial sebagai instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
5) secara normatif, menjadi landasan penyusunan Rencana Aksi Tahunan yaitu rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun..

1.3. **Landasan Hukum**.

Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4844) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5) Undang-Undang Republik Indonesia 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor), yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);

10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);

11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.1-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembar Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 14, Noreg Peraturan

Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 405-14/2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 14);

18) Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (Gakin) untuk Kegiatan Pemugaran Rumah Kabupaten Gresik;

19) Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Penduduk Miskin di Daerah;

20) Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/229/HK/437.12/2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024.

1.4. **Metodologi**.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan dokumen rencana jangka menengah (lima tahunan) penanggulangan kemiskinan yang menjadi bagian dari dokumen RPJMD (Permendagri No. 53/2020 pasal 20 ayat (3)), setidaknya sesuai dengan target pemerintah dalam RPJMN dan mendukung komitmen Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karenanya RPKD idealnya di susun sebelum RPJMD (Rencana Pembangunan jamngka Menengah Daerah) atau setidaknya paralel, karena diharapkan mewarnai atau menjadi mainstream untuk rencana aksi yang bersifat menengah.

Konsep umum penyusunan RPKD berbasis pada perumusan masalah kemiskinan yang nyata terjadi di daerah, yang diperoleh dari pengolahan data dan informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga dapat dipastikan pada sektor apa yang memiliki permasalahan, bagaimana kesenjangan pencapaiannya, serta dimana permasalahan itu terjadi.

Pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksudkan di atas, dapat dilakukan dalam bentuk identifikasi tantangan atau kesenjangan yang dihadapi kelompok miskin relatif terhadap kelompok non miskin. Tantangan tersebut di olah menjadi 5 (lima) pertanyaan analisis sebagaimana digambarkan pada bagan berikut.

Gambar 1.2
Lima Pertanyaan Analisa dalam Penyusunan RPKD

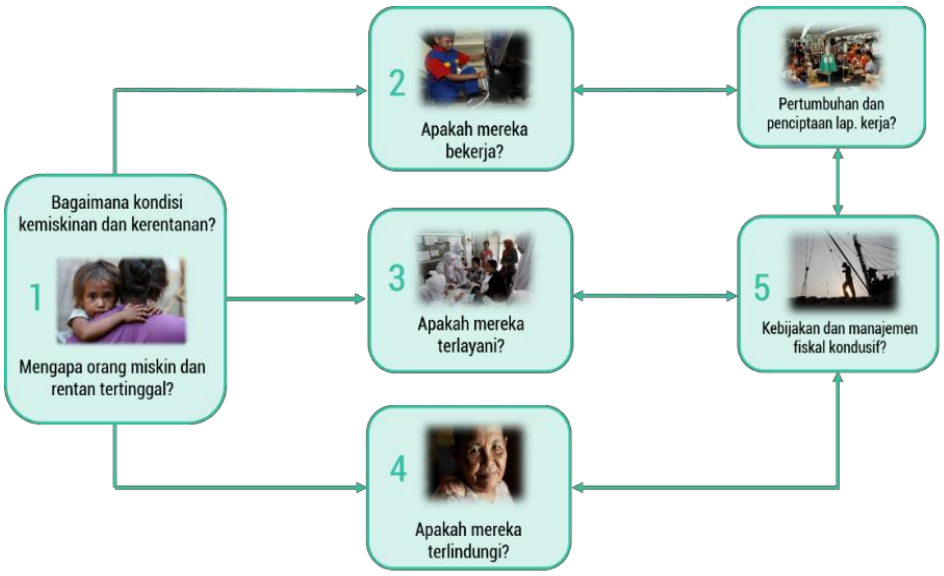

Sumber: https://sepakat.bappenas.go.id/demo/snapa/

Hasil pengolahan data dan informasi ini selanjutnya dapat dirumuskan intervensi terbaik (prioritasisasi intervensi) sesuai permasalahan dan kondisi yang ada dengan data dukung terkait target lokasi dan target sasaran.

1.4.1. Jenis dan Sumber Data.

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gresik, menggunakan data-data berupa data kuantitatif dengan pengumpulan data dilakukan secara partisipatif. Data kuantitatif diperoleh dari data-data sekunder yang diperoleh dari BPS maupun dari Perangkat Daerah yang mengampu program-program penanggulangan kemiskinan.

1.4.2. Metode Analisis Data.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang berupaya untuk mencari (menginterpretasikan) unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena (data), sedangkan pendekatan analisis menggunakan pendekatan analisis data sekunder.

1.4.3. Tahapan Penyusunan Dokumen RPKD.

Penyusunan dokumen RPKD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun dengan tahapan sebagaimana disajikan pada bagan berikut.

Gambar 1.3

Tahapan Proses Penyusunan RPKD

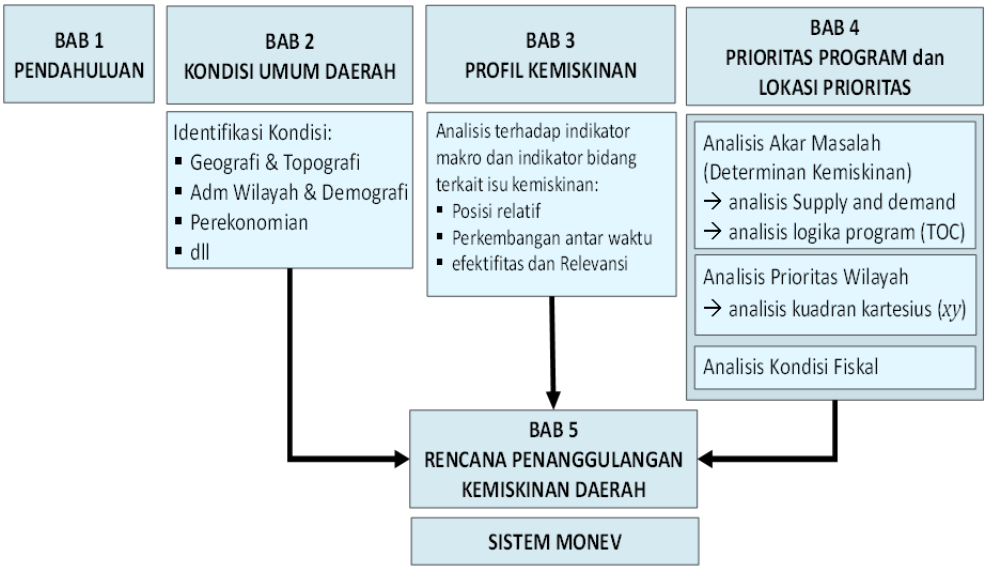

Sumber: *Materi Asistensi Teknis TKPK Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RPKD, RAT dan LP2KD. 2022*

A. Tahap Persiapan;

Merupakan tahapan awal dari penyusunan dokumen RPKD dengan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk koordinasi bersama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka untuk menyamakan persepsi terkait substansi dan teknis kegiatan termasuk penyiapan kebutuhan data/informasi yang akan dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen RPKD. Dalam tahap persiapan ini termasuk kesepakatan instrumen yang digunakan untuk menghimpun data.

Output dari tahapan ini adalah Laporan Pendahuluan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

B. Penyusunan Kondisi Umum Daerah;

Merupakan studi literatur dalam rangka mengumpulkan informasi tentang kondisi umum diuraikan dalam bentuk deskriptif dan diperdalam dalam konteks kemiskinan meliputi kondisi geografis dan demografi serta administrasi wilayah; struktur dan pertumbuhan ekonomi; serta perkembangan inflasi.

C. Profil Kemiskinan Daerah;

Menggambarkan bagaimana kondisi kemiskinan daerah secara umum dengan melihat capaian setiap indikator utama pada kemiskinan konsumsi dan kemiskinan non-konsumsi dengan memanfaatkan analisis terhadap agregat data makro dan mikro yang bersumber dari BPS, maupun data kemiskinan daerah lainnya yang terkait dengan indikator utama.

Tahapan analisis untuk profil kemiskinan daerah adalah:

(1) Analisis terhadap Indikator Makro:

Merupakan analisis awal terhadap kondisi kemiskinan daerah digambarkan melalui beberapa tahapan analisis terhadap indikator makro kemiskinan meliputi jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2), serta kemiskinan ekstrem.

Tahapan analisis yang dilakukan adalah:

- ❑ analisis posisi relatif, bertujuan untuk membantu melihat capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk jika dibandingkan dengan pencapaian di tingkat provinsi dan nasional, analisis posisi relatif juga melihat apakah pencapaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama atau lebih buruk jika dibandingkan dengan indikator kinerja/target.
- ❑ analisis perkembangan antar waktu, analisis ini diperlukan untuk men-jelaskan perkembangan indikator dari waktu ke waktu (tahun ke tahun), apakah pencapaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada pencapaian tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam ima tahun terakhir, selanjutnya men-jelaskan apakah capaian indikator tersebut dari tahun ke tahun selama periode yang dimaksud mengalami fluktuasi, konsisten membaik, atau memburuk.

  Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari publikasi BPS.

(2) Analisis terhadap Indikator Bidang terkait Isu Kemiskinan:

Secara umum bidang-bidang terkait isu kemiskinan adalah bidang Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar

(perumahan dan permukiman), dan bidang ketahanan pangan. Analisis ini ber-tujuan untuk menemukan apa-apa saja permasalahan yang terjadi di setiap indikator bidang yang harus diprioritaskan (menjadi fokus masalah). Untuk itu setiap indikator bidang tersebut dianalisis dengan cara Analisis Posisi Relatif dan Analisis Perkembangan Antar Waktu.

Indikator-indikator yang akan dianalisis adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Indikator Bidang Terkait Isu Kemiskinan

Bidang	Indikator
(1)	(2)
Pendidikan	- Angka Partisipasi Murni SD sederajat - Angka Partisipasi Murni SMP sederajat - Angka Partisipasi Murni SMA sederajat - Angka Putus Sekolah Usia 7-12 tahun - Angka Putus Sekolah Usia 13-15 tahun - Angka Putus Sekolah Usia 16-18 tahun - Rata-Rata Lama Sekolah - Harapan Lama Sekolah - Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15^{+}
Kesehatan	- Angka Kematian Neonatal /1000 kelahiran hidup - Angka Kematian Bayi /1000 kelahiran hidup - Angka Kematian Balita /1000 kelahiran hidup - Angka Kematian Ibu /100.000 kelahiran hidup - Prevalensi Balita Gizi Buruk - Prevalensi Balita Gizi Kurang

Lanjutan tabel 1.1

Bidang	Indikator
(1)	(2)
	- Prevalensi Stunting pada Balita - Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi - Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih - Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Rasio Bidan per 100.000 penduduk - Angka Harapan Hidup
Ketenagakerjaan	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - Tingkat Pengangguran Terbuka - Tingkat Setengah Pengangguran - Penduduk Usia Idle
Perumahan dan Permukiman	- Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak - Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak - Rumah Tangga dengan Akses Listrik - Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Tempat Tinggal Milik Sendiri - Rumah Layak Huni
Ketahanan Pangan	- Kondisi Kerawanan Pangan/Prevalensi Ketidakcu-kupan Konsumsi Pangan - Produktivitas Padi (ton/ha) - Perkembangan Harga Kebutuhan Pangan Pokok
Sosial	- Rumah Tangga penerima Raskin / BPNT - Rumah Tangga penerima PKH - Rumah Tangga penerima KPS / KKS - Rumah Tangga penerima PIP / KIP - Rumah Tangga penerima KIS
Bidang-Bidang strategis lainnya sepanjang berkaitan dengan isu-isu penanggulangan kemiskinan.	

Sumber *Draf Panduan Penyusunan RPKD (Pelaksanaan Permendagri 53/2020)*

dengan sumber data sekunder yang berasal dari BPS maupun data-data kemiskinan daerah terkait. Indikator-indikator yang akan menjadi fokus/prioritas adalah indikator-indikator yang menunjukkan tren perkembangan memburuk dan indikator- indikator yang capaiannya lebih buruk terhadap capaian di tingkat Provinsi dan Nasional.

D. Prioritas Program;

Analisis prioritas program, didahului dengan analisis akar masalah penyebab kemiskinan yang dihadapi pada setiap bidang terkait isu kemiskinan. Akar masalah tersebut diperoleh melalui analisis pohon masalah dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan (*supply side*) dan aspek pemanfaatan (*demand side*). Sementara itu dalam menen-tukan prioritas program terhadap hasil analisis *supply-demand*, dilakukan melalui analisis logika program atau metode teori perubahan (*theory of Change*) dan analisis keterkaitan.

E. Lokasi Prioritas;

Analisis lokasi prioritas, adalah memetakan prioritas wilayah intervensi yaitu kecamatan mana yang segera memerlukan intervensi melalui program kebijakan tertentu. Wilayah yang perlu untuk diprioritaskan dalam intervensi terhadap Indikator bidang terkait isu kemiskinan

dapat diketahui dengan memetakan wilayah berdasarkan capaian indikator masing-masing bidang tersebut.

Untuk keperluan ini dalam satu grafik x-y (*Scatter*) dapat di plot koordinat yang dibentuk oleh variabel capaian indikator-indikator bidang terkait isu kemiskinan di setiap wilayah. Yaitu, variabel capaian indikator yang menjadi prioritas berada pada sumbu x (horizontal) dan variabel capaian indikator pendukung yang menjadi prioritas berada pada sumbu y (vertikal). Titik-titik hasil plot ini dapat dipisahkan ke dalam empat kuadran (kuadran kartesius). Masing-masing kuadran mewakili urutan prioritas kelompok wilayah dalam intervensi terhadap indikator kemiskinan yang bersangkutan dengan penentuan identitas prioritas (prioritas 1, 2, 3 ataukah prioritas 4) pada masing-masing kuadran, tergantung dari persepsi dari masing-masing indikator.

F. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

Rencana penanggulangan kemiskinan daerah merupakan kumpulan prioritas program dalam bentuk matriks dilengkapi dengan lokasi prioritas dan target dalam 5 tahun ke depan, dengan nomenklatur program mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.115.1.3406 Tahun 2024.

Bagian ini di awali dengan narasi tentang strategi penanggulangan kemiskinan serta pendekatan dan tahapannya. Dilanjutkan dengan matriks program.

G. Sistem Monitoring Evaluasi;

Rancangan sistem monitoring terhadap rencana aksi dibuat untuk me-mastikan bahwa program/kegiatan yang disusun mempunyai sistem kendali dan hasil dari program dan kegiatan tersebut dapat terukur.

Rancangan sistem monitoring dilakukan untuk melihat apakah program dan kegiatan berjalan baik, apakah program dan kegiatan memiliki ukuran-ukuran capaian (indikator), bagaimana program dan kegiatan tersebut mempunyai hasil dan dampak yang dapat ditunjukkan dari perubahan indikator yang sudah ditentukan.

Hal-hal penting dalam rencana sistem monitoring, antara lain:

(1) Mekanisme dan Prosedur Monitoring tingkat daerah, kelompok masyarakat, dan tingkat rumah tangga/individu.
(2) Indikator Monitoring/Kinerja terdiri: (i) indikator kinerja program; (ii) indikator kinerja makro; dan (iii) indikator kinerja bidang terkait isu kemiskinan.
(3) Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM).

1.5. **Sistematika Dokumen RPKD**.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 pasal 20 ayat (2), maka dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab II Kondisi Umum Daerah.

Bab III Profil Kemiskinan Daerah.

Bab IV Prioritas Program dan Lokasi Prioritas.

Bab V Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Bab VI Sistem Monitoring dan Evaluasi.

Bab VII Penutup.

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah

2 Gambaran Umum Daerah

dokumen

RPKD 2025-2029
Kabupaten Gresik

BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN GRESIK

2.1. Geografi dan Administrasi Wilayah.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur yang cukup dikenal sebagai kota wali dan kota santri, selain itu juga dikenal dengan julukan kota pudak sebagai makanan khas. Kabupete Gresik terletak pada 112^{o} - 113^{o} Bujur Timur dan 7^{o} - 8^{o} Lintang Selatan, merupakan wilayah dataran yang berbatasan dengan pantai, berada di sebelah Barat Laut dari ibukota Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya), dengan batas wilayah:

sebelah utara : Selat Jawa;

sebelah barat : Kabupaten Sidoarjo;

ebelah selatan : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto;

sebelah timur : Selat Madura dan Kota Surabaya.

Secara umum, wilayah kabupaten Gresik dibagi menjadi dua, yaitu Gresik daratan dan Pulau Bawean. Kabupaten Gresik memiliki luas 1,256 km^2, termasuk didalamnya kawasan Pulau Bawean dengan luas wilayah ±190 km^2. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten

Gresik merupakan pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan kecamatan Sangkapura dan kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean.

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Gresik memiliki tinggi kurang dari 200 mdpl. Selanjutnya, berdasarkan jarak ke Ibukota Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik merupakan kecamatan yang memiliki jarak terdekat ke ibukota di Kabupaten Gresik dengan jarak 1,3 km.

Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 - 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean.

Lokasi Kabupaten Gresik yang berada di sekitar garis khatulistiwa menye-babkan daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi

pada bulan Desember sampai dengan Maret. Diantara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba, dimana biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang biasa disebut Angin Gending.

Secara administratif Kabupaten Gresik terbagi ke dalam 18 (delapan belas) kecamatan yang terbagi menjadi 333 desa dan 26 Kelurahan, dengan 2 (dua) kecamatan berada di pulau Bawean adalah Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah

Kecamatan		Jumlah				Luas Wilayah (km^2)
		Desa	Kelurahan	RW	RT	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Wringinanom	16	-	90	320	62,62
02	Driyorejo	16	-	109	456	51,30
03	Kedamean	15	-	98	329	65,96
04	Menganti	22	-	154	488	68,71
05	Cerme	25	-	127	371	71,73
06	Benjeng	23	-	104	332	61,26
07	Balongpanggang	25	-	108	321	63,88
08	Duduksampean	23	-	57	192	74,29
09	Kebomas	11	10	92	450	30,06
10	Gresik	5	16	80	362	5,54
11	Manyar	23	-	117	521	95,42
12	Bungah	22	-	106	291	79,49
13	Sidayu	21	-	70	194	47,13

Lanjutan tabel 2.1

Kecamatan		Jumlah				Luas Wilayah (km^2)
		Desa	Kelurahan	RW	RT	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Dukun	26	-	101	320	59,03
15	Panceng	14	-	72	226	62,59
16	Ujungpangkah	13	-	88	264	94,82
17	Sangkapura	17	-	133	298	118,72
18	Tambak	13	-	96	203	78,70
	Jumlah	330	36	1.802	5.938	1.191,25

Sumber: *Publikasi BPS, data di olah*

Dari 18 kecamatan yang ada, Kecamatan Sangkapura merupakan kecamatan terluas yang memiliki luas 118,72 Km2 atau sekitar 9,97 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kebomas dengan luas 30.06 Km2 atau sekitar 2,52 persen dari luas wilayah Kabupaten Gresik.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik

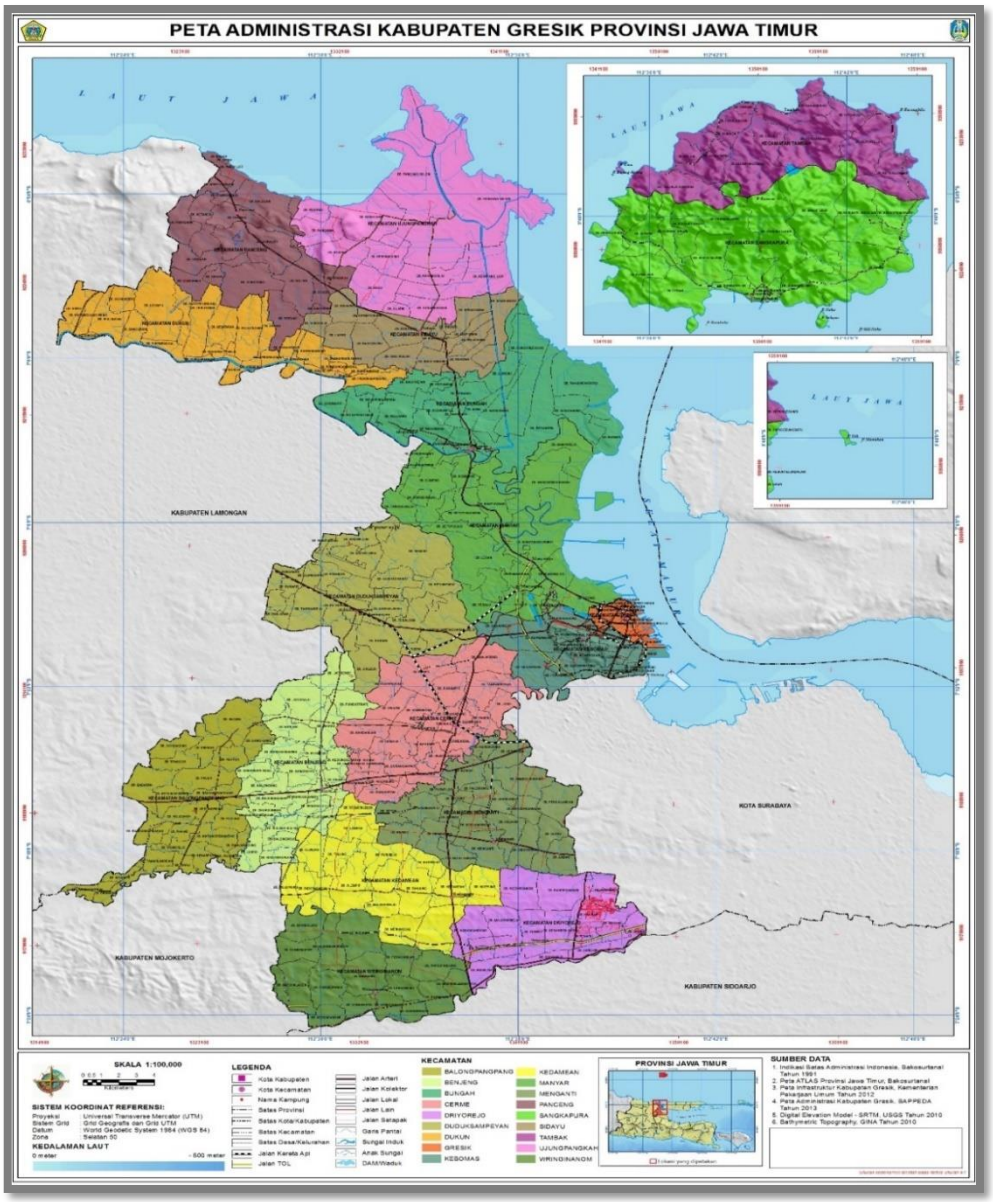

2.2. **Penduduk dan Ketenagakerjaan**.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2024 berjumlah 1.327.497 jiwa. Jumlah ini menunjukkan

peningkatan sebesar 2,38 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 1.296.688 jiwa.

Gambar 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik
Tahun 2020-2024

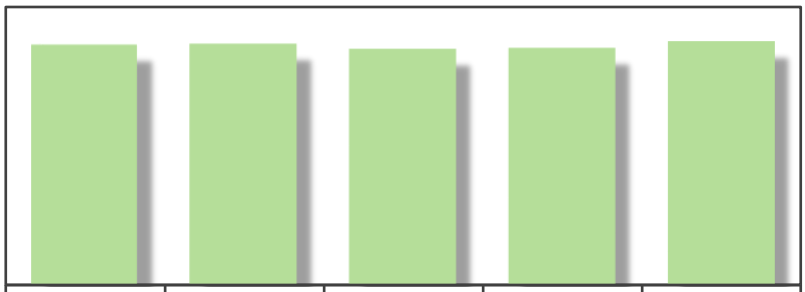

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	1.311.215	1.314.895	1.291.518	1.296.688	1.327.497

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

Angka kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebesar ±1.114 jiwa/km², angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan angka kepadatan penduduk tahun 2023 yang sebesar ±1.083 jiwa/ km². Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 terdapat di Kecamatan Gresik dengan kepadatan penduduk ±14.407 jiwa/km^2 dan pada tahun 2024 angka kepadatannya naik menjadi ±14.441 jiwa/km^2, sedangkan Kecamatan Tambak merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu pada tahun 2023 sebesar ±385 jiwa/km^2, sedangkan pada tahun 2024 angka kepadatannya naik menjadi ±394 jiwa/km^2.

Tabel 2.2

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik menurut Kecamatan, Tahun 2023 dan 2024

Kecamatan		Luas (km^2)	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km^2)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010	Wringinanom	62,62	72.672	1.161	74.154	1.184
020	Driyorejo	51,30	104.402	2.035	108.924	2.124
030	Kedamean	65,96	63.290	960	64.213	974
040	Menganti	68,71	127.809	1.860	133.875	1.948
050	Cerme	71,73	81.460	1.136	83.903	1.170
060	Benjeng	61,26	65.612	1.071	66.608	1.087
070	Balongpanggang	63,88	56.290	881	56.862	890
080	Duduksampean	74,29	49.470	666	49.736	669
090	Kebomas	30,06	112.068	3.728	115.078	3.828
100	Gresik	5,54	79.815	14.407	80.005	14.441
110	Manyar	95,42	118.437	1.241	122.645	1.285
120	Bungah	79,49	68.201	858	69.581	876
130	Sidayu	47,13	43.689	927	44.542	945
140	Dukun	59,03	65.632	1.112	66.086	1.118
150	Panceng	62,59	52.626	841	53.606	856
160	Ujungpangkah	94,82	51.760	546	52.359	552
170	Sangkapura	118,72	53.122	447	54.311	457
180	Tambak	78,70	30.333	385	31.009	394
	Jumlah	1.191,25	1.296.688	1.089	1.327.497	1.114

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Gresik yang berjumlah 1.327.497 jiwa terdiri dari 667.540 jiwa laki-laki dan 659.957 jiwa

perempuan, sehingga memiliki angka rasio seks sebesar 101 yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat ±101 penduduk laki-laki.

Berdasarkan komposisi usia, penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2024 lebih banyak berusia produktif yang berada pada usia antara 15–64 tahun yaitu sebanyak 942.326 jiwa atau sebesar 70,99 persen. Sementara itu untuk kelompok usia tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas) sebanyak 385.171 jiwa atau 29,01 persen. Dengan demikian rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2024 adalah sebesar 40,87 persen.

Gambar 2.3

Persentase Penduduk Kabupaten Gresik, berdasar sebaran kelompok Usia Produktif

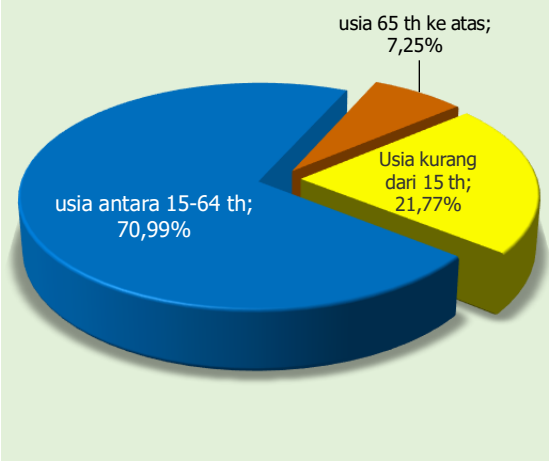

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Gresik pada Agustus 2024 sebanyak 1.068,265 orang, meningkat sekitar 14,37 ribu orang (0,36%) dibandingkan keadaan setahun yang lalu.

Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, terdiri dari angkatan kerja sebanyak 764.971 orang dan 303.294 orang penduduk bukan angkatan kerja. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Gresik pada tahun 2024 mencapai 71,61 persen.

Dari penduduk angkatan kerja tersebut, terdapat penduduk angkatan kerja yang bekerja sebanyak 715.619 orang, bertambah sekitar 26,97 ribu orang (3,92%) dibandingkan dengan keadaan Agustus 2023. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik pada Agustus 2024 mencapai 49.352 orang, berkurang sebanyak 0,81 ribu orang (-1,61%) dibandingkan keadaan Agustus 2023. Dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik pada tahun 2024 mencapai 6,45 persen, dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 93,55 persen.

Sektor jasa masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan menyerap sebanyak 358.844 orang atau sebesar 55,14 persen dari total penduduk yang bekerja, sedangkan sektor pertanian paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya sebesar 13,95 persen dari total penduduk bekerja. Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar pekerja di Kabupaten Gresik adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 51,61 persen dari sejumlah angkatan kerja yang bekerja.

Tabel 2.3

Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik, Tahun 2022-2024

Indikator	Keadaan Agustus Tahun:		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk usia kerja (usia 15^{+})	1.055.406	1.053.894	1.068.265
Penduduk angkatan kerja	720.872	719.013	764.971
bekerja	664.371	668.645	715.619
pengangguran terbuka	56.501	50.368	49.352
Penduduk bukan angkatan kerja	334.534	334.881	303.294
masih sekolah	77.711	104.721	77.102
Penduduk *idle*	256.823	230.160	226.192
Penduduk bekerja di sektor pertanian	92.520	97.888	99.824
Penduduk bekerja di sektor industri	236.167	261.791	256.951
Penduduk bekerja di sektor jasa	335.684	328.966	358.844

Sumber: *BPS. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi JawaTimur - data di olah*

2.3. **Ekonomi Daerah**.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat bagaimana struktur ekonomi dan perkembangan ekonominya.

1) Struktur Ekonomi.

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik dapat diketahui dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten

Gresik pada kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Selama lima tahun terakhir (Tahun 2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Gresik di dominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; terakhir adalah kategori Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gresiksebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Distribusi Persentase PDRB-ADHB Kabupaten Gresik
Tahun 2020-2024

Kategori Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan Perikanan	7,70	7,02	6,76	6,79	6,55
B Pertambangan dan Penggalian	5,96	6,94	8,39	6,88	6,14
C Industri Pengolahan	49,59	49,96	49,44	50,33	51,25
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,51	0,47	0,45	0,43	0,43
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
F Konstruksi	9,42	8,92	8,74	8,79	8,67

Lanjutan tabel 2.4

Kategori Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,47	12,62	12,67	12,92	12,89
H	Transportasi dan Pergudangan	2,48	2,37	2,50	2,78	2,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,33	1,35	1,36	1,42	1,44
J	Informasi dan Komunikasi	4,48	4,47	4,14	4,16	4,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,20	1,16	1,13	1,12	1,13
L	Real Estate	1,40	1,39	1,32	1,30	1,27
M,N	Jasa Perusahaan	0,32	0,31	0,29	0,30	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,41	1,31	1,20	1,17	1,25
P	Jasa Pendidikan	0,94	0,90	0,81	0,83	0,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,45	0,45	0,41	0,40	0,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,27	0,28	0,31	0,31	0,32
Produk Regional Domestik Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber*: BPS, PDRB Kabupaten Gresik Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024*

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 51,25 persen (angka ini meningkat dari 49,59 persen di

tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,89 persen (meningkat dari 12,47 persen di tahun 2020), serta lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,67 persen (turun dari 9,42 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,55 persen (turun dari 7,70 persen di tahun 2020); serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,14 persen (meningkat dari 5,96 persen di tahun 2020). Sementara itu, peranan dari 12 lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Pada tahun 2024, di antara kelima lapangan usaha tersebut, hanya ada 1 kategori yang mengalami peningkatan peranan jika dibandingkan tahun 2023, yaitu Industri Pengolahan. Sementara peranan kategori Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kecenderungan menurun. Pada Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor cenderung meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2024.

2) Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar

lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Gresik atas dasar harga konstan 2010 mencapai 119,27 triliun rupiah pada tahun 2023. Angka tersebut naik dari 5,45 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 per-ekonomian Kabupaten Gresik tumbuh sebesar 4,79 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang

Gambar 2.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik
Tahun 2020-2024

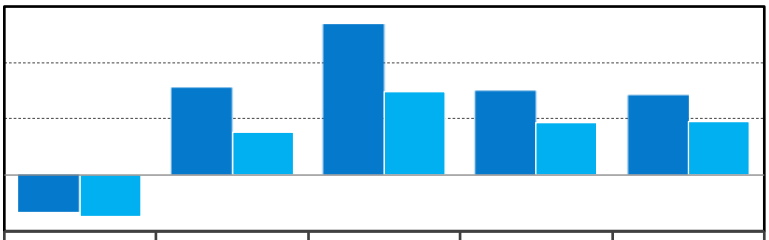

	2020	2021	2022	2023	2024
Laju PDRB-ADHB	-3,33	7,74	13,31	7,42	7,00
Laju PDRB-ADHK	-3,68	3,79	7,38	4,62	4,79

Sumber : *BPS, PDRB Kab. Gresik Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 – data di olah*

tumbuh sebesar 4,62 persen.

Perbaikan sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19 mampu mendorong perekonomian Kabupaten Gresik selama tahun 2024. Seluruh lapangan usaha perekonomian tumbuh positif selama tahun 2024, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sedalam 5,49 persen.

Mobilitas penduduk yang meningkat seiring dengan membaiknya pandemi pada tahun 2024 masih memberikan multiplier effect pada

beberapa sektor ekonomi. Selain itu, beberapa peristiwa penting seperti Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 juga memengaruhi beberapa sektor ekonomi. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh paling tinggi di antara kategori lain, yaitu 8,88 persen.

Pemanfaatan digitalisasi di hampir semua sektor perekonomian sebagai bentuk adaptasi pelaku ekonomi selama pandemi COVID-19 juga membantu membaiknya perekonomian pasca pandemi di tahun 2024. Perkembangan *e-commerce* yang cukup pesat juga mendorong hampir seluruh sektor ekonomi.

3) PDRB per Kapita.

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi makro lain terkait tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yaitu merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah/ wilayah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat pada daerah/wilayah tersebut.

Tabel 2.5
PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Gresik, Tahun 2020-2024

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
- ADHB	134.269	144.656	163.908	176.261	188.605
- ADHK 2010	97.617	101.319	108.797	113.825	119.274
PDRB per kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	102.623	109.418	122.650	130.527	138.271
- ADHK 2010	74.609	76.637	81.411	84.291	87.443
Pertumbuhan PDRB per Kapita (%)	-3,24	2,72	6,23	3,54	3,74

Sumber: *BPS. PDRB Kab. Gresik menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024*

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah

3

Profil Kemiskinan Daerah

dokumen

RPKD 2025-2029
Kabupaten Gresik

BAB III
PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN GRESIK

3.1. Pengertian dan Konsep Kemiskinan.

Pengertian kemiskinan dapat dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dirinya secara relatif sesuai persepsi yang dimilikinya, yang mencakup ketidakmampuan ekonomis dan non ekonomis seperti sosial, politik dan spiritual (Kurnianingsih, 2012:47), Pengertian kemiskinan lainnya juga disampaikan oleh Supriatna (1997:90) yang menjelaskan bahwa kemiskinan adalah situasi serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak individu yang bersangkutan. Individu ter- masuk miskin ketika ia memiliki kecukupan yang rendah dalam aspek tingkat pendapatan, pendidikan, produktivitas kerja, kesehatan, gizi, serta kesejahteraan hidup yang menunjukkan lingkaran ketidak- berdayaan (Kadji, tt:1).

Meskipun secara luas kemiskinan dikaitkan dalam aspek yang cukup luas dalam kehidupan, akan tetapi untuk memudahkan penetapannya, kemiskinan sering diidentikkan pengukurannya dengan indikator ekonomi. Dalam pengertian sempit, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam hal ekonomi.

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau kekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (social distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu diten- tukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kese- jahteraan antar penduduk.

Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (poverty line) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan (poverty line) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada defenisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan absolut ini bisa diartikan dari melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat

pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin.

Pada tahun 1976 *International Labor Organization* (ILO) menggunakan ukuran kebutuhan pokok untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Indikator-indikator kebutuhan pokok dimaksud adalah pangan, papan, sandang dan fasilitas umum seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan transportasi. Strategi yang digariskan oleh ILO tersebut menyebutkan adanya keharusan usaha langsung untuk memperbaiki nasib golongan yang paling miskin tanpa menunggu bekerjanya proses tetesan ke bawah.

World Bank (2008) menghitung tingkat dan jumlah penduduk miskin absolut dengan menggunakan ukuran tunggal yang seragam untuk semua negara yaitu PPP (*Purchasing Power Parity* atau Paritas Daya Beli). Di negara-negara sedang berkembang seseorang disebut miskin bila berpendapatan kurang dari $US 1 per kapita per hari. Sementara garis kemiskinan yang di ukur berdasarkan ukuran $US 2 perkapita per hari juga telah dipublikasikan dan ukuran ini diperbaharui pada oleh Bank Dunia pada tahun 2021 menjadi $US 1,25 per kapita per hari dan $US 2,5 perkapita per hari. US dollar yang digunakan adalah

US $ PPP bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

Garis kemiskinan di Indonesia secara luas digunakan pertama kali dikenalkan oleh Sajogyo pada tahun 1964 yang di ukur berdasarkan konsumsi setara beras per tahun. Menurut Sajogyo terdapat tiga ukuran garis kemiskinan yaitu miskin, sangat miskin dan melarat yang di ukur berdasarkan konsumsi per kapita per tahun setara beras sebanyak 480 kg, 360 kg dan 270 kg untuk daerah perkotaan dan 320 kg, 240 kg dan 180 kg untuk daerah pedesaan.

BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin (*head count index*) yaitu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Garis kemiskinan yang merupakan dasar penghitungan jumlah penduduk miskin di hitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan atau lebih dikenal dengan garis kemiskinan makanan dan non makanan.

Garis kemiskinan makanan yang dimaksud adalah pengeluaran konsumsi per kapita per bulan yang setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah

besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang atau jasa lainnya. Komponen garis kemiskinan makanan adalah nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi 52 komoditi makanan terpilih hasil Susenas modul konsumsi. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah nilai rupiah dari 27 sub kelompok pengeluaran yang terdiri atas 51 jenis komoditi dasar non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Dapat disimpulkan secara umum bahwa kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terburuk yang di ukur dari tingkat kemampuan suatu keluarga dalam membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan taraf hidup kemanusiaan yang paling rendah. Oleh karena itu, dokumen Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan ini selanjutnya mengacu kepada defenisi kemiskinan tersebut.

Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada di lapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam kategori seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin

sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada di lapisan terbawah.

Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya perbedaan antara 20 atau 10 persen masyarakat paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketim- pangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara mereka yang berada di bawah (miskin) dan mereka yang makmur dalam setiap dimensi statifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

World Bank mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah

dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan di ukur dengan menghitung persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang.
- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda dimana tergantung dari pengalaman dan perspektif

analis. Cara pandang analis akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana kemiskinan itu terjadi (sebab-sebab kemiskinan) dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Oleh karena itu, agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjelaskan pengertian dan penyebab kemiskinan secara lengkap.

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam kategori miskin. Namun, menurut World Bank setidaknya ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

(1) Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
(2) Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat.
(3) Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidak-mampuan menanggulanginya.

Bank Dunia (*World Bank*) memiliki indikator-indikator kemiskinan yang terdiri dari:

(1) Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas;
(2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
(3) Pembangunan yang bias di kota;

(4) Perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat;

(5) Perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi;

(6) Rendahnya produktivitas;

(7) Budaya hidup yang jelek;

(8) Tata pemerintahan yang buruk; dan

(9) Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

World Bank (2005) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki banyak pengertian dimana menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang ingin lepas darinya.

World Bank (2001) juga mendefinisikan kemiskinan sebagai keter-cabutan dari kehidupan yang layak. Miskin adalah keadaan kelaparan, kurang tempat tinggal, kurang sandang dan kurang pendidikan. Menurut defenisi ini, orang menjadi miskin bukan karena kelemahan mereka, namun karena hal itu terjadi di luar kendali mereka. Biasanya, karena kebijakan yang buruk dari institusi negara atau masyarakat yang tidak memperhatikan suara mereka.

World Bank (2004) mendefinisikan masyarakat miskin sebagai mereka yang hidup dalam keluarga yang kemampuan konsumsinya di bawah garis tertentu, seperti di bawah $ 1 atau $ 2 per hari atau dibawah level yang ditetapkan negara masing-masing.

Sementara itu terdapat juga banyak faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kemiskinan, mulai dari produk- tivitas tenaga kerja, tingkat upah netto, distribusi pendapatan, kesem- patan kerja, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta sumber daya alam, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, listrik, air bersih dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam suatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, budaya atau tradisi, politik, bencana alam dan peperangan. Sebagian besar dari faktor-faktor tersebut adalah saling mempengaruhi satu sama lain.

Sedangkan menurut Jhinghan (2000) terdapat tiga ciri utama pada negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat dari terjadinya kemiskinan. Ciri pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketrampilan atau keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Ciri ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

Hal ini terjadi karena penduduk tidak memiliki pilihan lain. Kepemilikan tanah rata-rata per petani cukup sempit dan sebagai akibatnya mereka terpaksa hidup pada tingkat yang hanya cukup untuk sekedar hidup.

Kartasasmita (1996) juga menjelaskan penyebab terjadinya kemiskinan dimana akibat dari berbagai faktor yang terdiri dari: pertama, rendah-nya tingkat pendidikan menyebabkan pengembangan diri yang terbatas. Kedua, rendahnya tingkat kesehatan dimana tingkat kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan daya tahan fisik, daya pikir serta prakarsa menjadi rendah pula. Dengan demikian produktivitas yang dihasilkan menjadi berkurang, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Akibat dari hal ini adalah bargaining position mereka dalam hampir seluruh kegiatan ekonomi menjadi lemah. Ketiga, terbatasnya lapangan kerja. Selama lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha masih ada, harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan masih dapat dilakukan. Ke-empat, kondisi keterisolasian. Dalam kondisi terpencil atau terisolasi penduduk akan kurang mampu menjalankan roda perekonomiannya.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan

yang bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang ber- martabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi ter- penuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Bappenas 2004).

Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin, Bappenas meng- gunakan pendekatan utama antara lain:

(1) Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yang melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum yang terdiri dari pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan penyediaan air bersih dan sanitasi.

(2) Pendekatan pendapatan (income approach), menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung dapat mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.

(3) Pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*), pendekatan ini menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat.

(4) Pendekatan objektif dan subjektif, pendekatan objektif atau sering disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan.

Dari pendekatan-pendekatan tersebut, Bappenas menguraikan indikator-indikator penyebab kemiskinan seperti:

(1) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.

(2) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap prilaku hidup sehat, kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.

(3) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas

pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.

(4) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlin- dungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.

(5) Terbatasnya akses layanan kesehatan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak.

(6) Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.

(7) Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian.

(8) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam.

(9) Lemahnya jaminan rasa aman, terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerah konflik.

(10) Lemahnya partisipasi. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang melibatkan mereka.

(11) Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besar-nya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.

Ukuran Kemiskinan.

Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, sebaran dan kondisi kemis- kinan diperlukan pengukuran kemiskinan yang tepat sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan akan efektif. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya menjadi instrument yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pengukuran kemiskinan yang baik akan me-mungkinkan dalam melakukan evaluasi dampak dari pelaksanaan proyek, membandingkan kemiskinan antar waktu dan menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk menguranginya.

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pen- dekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan itu indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Selain *head count index* (P0) terdapat juga indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskianan, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan (*distributionally sensitive index*) atau P2. Metode penghitungan ini merupakan dasar penghitungan persentase penduduk miskin seluruh kabupaten/kota.

Head count index (P0) merupakan jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Demikian juga sebaliknya, bila angka P0 besar maka

menunjukkan tingginya jumlah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Poverty Gap Index (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka ini memperlihatkan jurang (gap) antara pendapatan rata-rata yang diterima penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi angka ini maka semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Distributionally Sensitive Index (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Angka ini memperlihatkan sensitivitas distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin kecil angka ini menunjukkan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata.

Variabel Kesejahteraan yang Mempengaruhi Kemiskinan.

Metode untuk menentukan garis kemiskinan di Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan indikator

yang digunakan adalah *head count index* (P0) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Selain indeks kemiskinan (*head count index* atau P0), BPS juga menggunakan indikator lain dalam pengukuran kemiskinan yaitu indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*distributionally sensitive index* atau P2).

Kemiskinan absolut dipandang sebagai kondisi kemiskinan yang ter-buruk dimana di ukur dari tingkat kemampuan suatu keluarga dalam membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan taraf hidup kemanusiaan yang paling rendah. Dengan definisi ini, BPS telah menentukan suatu garis yang disebut dengan garis kemiskinan (poverty line). Bagi individu yang pengeluarannya untuk makanan dan non makanan berada pada level dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh BPS maka individu tersebut berada pada kelompok miskin.

Dalam dokumen ini indikator yang digunakan dalam menggambarkan jumlah penduduk miskinnya adalah *head count index* (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*). Persentase penduduk miskin atau *head count index* (P0) ini yang nantinya akan digunakan sebagai variabel terikat dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak hanya melihat bagaimana

pengaruh indikator kesejahteraan rakyat (Inkesra) terhadap persentase penduduk miskin (P0) tetapi juga terhadap indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan juga indeks keparahan kemiskinan (P2).

Berdasarkan teori-teori yang menyebabkan kemiskinan yang telah dijelaskan secara rinci sebelumnya di atas maka penelitian ini hanya membatasi pada faktor dan penyebab kemiskinan menurut versi BPS. Berdasarkan ciri dan faktor penyebab menurut versi BPS tersebut, tabel berikut ini menunjukkan variabel-variabel kesejahteraan masyarakat beserta indikator-indikator utama yang diperkirakan mempengaruhi kemiskinan.

Tabel 3.1

Variabel Kesejahteraan Masyarakat beserta Indikator Utama yang diperkirakan mempengaruhi Kemiskinan

Variabel (Bidang)	Indikator Utama (yang Disarankan)
Pendidikan	▪ Angka Partisipasi Murni ▪ Angka Partisipasi Kasar ▪ Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15^{+} ▪ Rata-Rata Lama Sekolah ▪ Harapan Lama Sekolah
Kesehatan	▪ Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup ▪ Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup ▪ Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100ribu kh ▪ Prevalensi Balita Gizi Buruk ▪ Persalinan ditolog oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

Lanjutan tabel 3.1

Variabel (Bidang)	Indikator Utama (yang Disarankan)
Ketenagakerjaan	▪ Tingkat Pengangguran Terbuka ▪ Pekerja Bekerja <35 jam per minggu ▪ Pekerja Bekerja di sektor informal
Infrastruktur Dasar	▪ Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak ▪ Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak ▪ Akses Rumah Tangga terhadap Elektrifikasi ▪ Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri ▪ Rasio Permukiman Kumuh Perkotaan
Ketahanan Pangan	▪ Tingkat Asupan Kalori Penduduk ▪ Perkembangan Harga Beras ▪ Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama ▪ Non Beras

Sumber: *Pedoman Penyusunan SPKD, 2021*

3.2. **Kondisi Kemiskinan Makro**.

3.2.1. Garis Kemiskinan.

Dasar penghitungan jumlah penduduk miskin di hitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum (konsumsi minimum). Besaran rupiah tersebut untuk selanjutnya disebut dengan garis kemiskinan, yang merupakan kumpulan titik potong (*cut off points*) dari kelompok miskin dan tidak miskin.

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Gresik selama periode lima tahun terakhir (tahun 2021-2025) adalah sebagaimana disajikan melalui gambar grafik berikut.

Gambar 3.1
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik

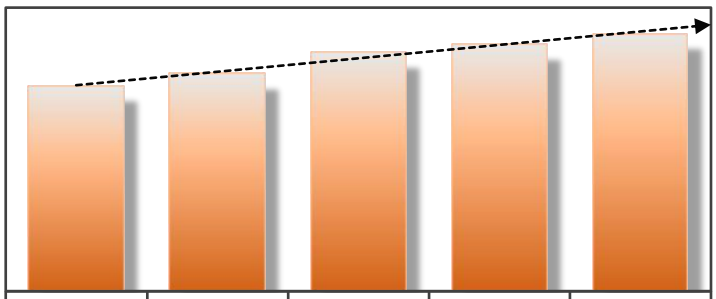

	2021	2022	2023	2024	2025
Garis Kemiskinan	505.499	536.544	588.316	608.828	635.154

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

Grafik di atas menunjukkan bahwa Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat. Dari Maret 2021 hingga Maret 2025, Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik naik sekitar 129,6 ribu rupiah yaitu dari Rp. 505.499 per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp. 635.154 per kapita per bulan pada Maret 2025.

Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh perkembangan harga-harga oleh sebab inflasi. Kondisi terus meningktanya garis kemiskinan tidak hanya terjadi di Kabupatan Gresik, tertapi secara Nasional juga demikian.

3.2.2. Jumlah Pendiduk Miskin.

Berdasarkan besaran nilai garis kemiskinan Maret 2025 di Kabupaten Gresik, maka jumlah penduduk miskin yaitu penduduk yang kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar bukan makanan per bulan di bawah garis kemiskinan Kabupaten Gresik pada adalah berjumlah 138,55 ribu jiwa. Jumlah ini turun sebanyak 3,38 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2024. Sementara itu, perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik selama kurun waktu tahun 2021-2025 adalah sebagaimana disajikan pada hambar grafik berikut.

Gambar 3.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik

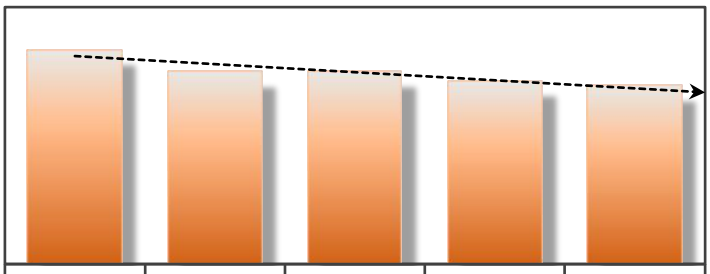

	2021	2022	2023	2024	2025
Penduduk Miskin (ribu jiwa)	166,35	149,64	149,75	142,38	138,55

Sumber*: Publikasi BPS – data di olah*

Berdasarkan gambar grafik di atas, nampak bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir menampilkan perkembangan antar waktu dengan kecenderungan tren menurun (membaik).

3.2.3. Persentase Penduduk Miskin.

Dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten Gresik pada Maret 2025 yang sebanyak 138,55 ribu jiwa, maka persentase penduduk miskin (P0) Kabupaten Gresik adalah sebesar 9,95 persen. Persentase ini turun sebesar 0,37 persen poin terhadap persentase penduduk miskin Maret 2024.

Gambar 3.3
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Gresik

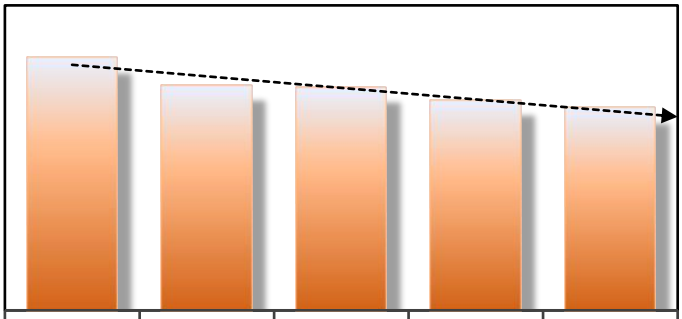

	2021	2022	2023	2024	2025
% Penduduk Miskin	12,42	11,06	10,96	10,32	9,95

Sumber : *Publikasi BPS – data di olah*

Sebagaimana tren perkembangaan jumlah penduduk miskin, pola perkembangaan persentase penduduk miskin selama kurun waktu 5 tahun terakhir juga menampilkan pola perkembangaan antar waktu dengan kecenderungan tren menurun (membaik).

Bila melihat persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 9,50 persen, sedangkan persentase penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar 8,47 persen, maka persentase penduduk

miskin Kabupaten Gresik tidak lebih baik, karena masih lebih tinggi terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dengan kata lain persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik pada Maret 2025 berada pada kategori tinggi. Sementara itu berdasar P-RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang menetapkan tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik tahun 2025 sebesar 9,70-9,40 persen, maka dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik hampir mencapai target.

Gambar 3.4
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2025

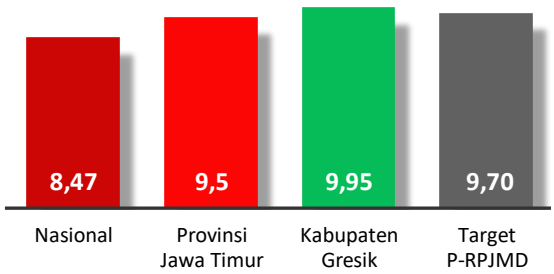

Sumber : *Publikasi BPS – data di olah*

3.2.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Capaian nilai indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gresik untuk Maret 2025 adalah sebesar 1,92 persen, nilai ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Gresik pada Maret 2025

sebanyak ±Rp 622.959,- (98,08% dari Garis Kemiskinan Maret 2025). Nilai P1 ini naik terhadap Maret 2024 yang sebesar 0,34 persen poin. Dengan naiknya nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Gresik cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan sehingga ketimpangan pengeluaran penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya juga semakin besar.

Gambar 3.5
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gresik

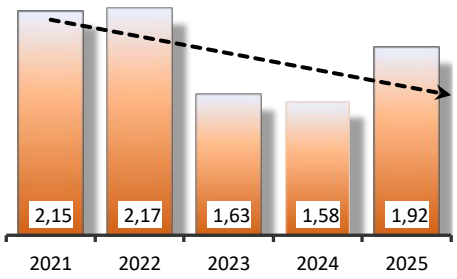

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

Bila melihat pola perkembangan selama 5 tahun terakhir (tahun 2021-2025), perkembangan nilai indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Gresik masih menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan tren menurun.

Pada Maret 2025 indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 1,41 persen sementara itu indeks kedalaman kemiskinan secara Nasional adalah sebesar 1,37 persen. Dengan demikian indeks ke dalaman kemiskinan Kabu paten Gresik berada pada kategori tinggi, hal ini karena capaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Gresik masih lebih tinggi dari capaian indeks

kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan indeks kedalaman kemiskin an secara Nasional.

Gambar 3.6
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2025

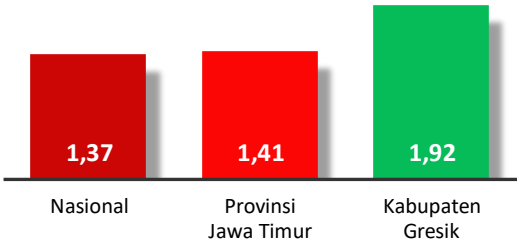

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

3.2.5. Indeks Keparahan Kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Gambar 3.7.
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik

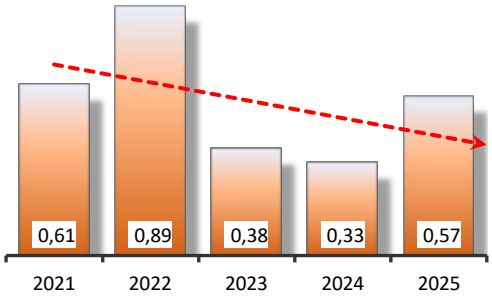

Sumber*: Publikasi BPS – data di olah*

Capaian indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Gresik untuk Maret 2025 adalah sebesar 0,57 persen. Nilai capaian ini naik terhadap Maret 2024 yang sebesar 0,33 persen. Dengan naiknya nilai indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata/ ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin Kabupaten Gresik

cenderung semakin membesar, sehinnga permasalahan antar penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya juga semakin beragam (heterogen).

Selama kurun waktu tahun 2021-2025, perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Gresik masih menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan tren menurun (membaik).

Pada Maret 2025 indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,19 persen sedangkan indeks keparahan kemiskinan secara Nasional sebesar 0,32 persen. Dengan demikian indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Gresik berada pa da kategori tinggi, Karena Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gresik berada di atas/lebih tinggi dari nilai indeks Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Gambar 3.8
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2025

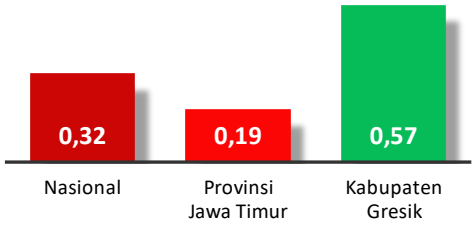

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

3.2.6. Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi

layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (*United Nations*, 1996). Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang berpendapatan di bawah US$1,91 PPP (*purchasing power parity*) per kapita per hari. PPP didefinisikan sebagai jumlah unit mata uang yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa yang umum yang dapat dibeli oleh satu unit mata uang umum/referensi. PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS, 2021).

Sejak tahun 2020 Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2024. Mengingat target 0 persen belum tercapai, maka pada RPJMN 2025-2029 kemiskinan ekstrem ditargetkan kembali menjadi 0 persen di tahun 2026.

Posisi relatif perkembangan capaian kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada gambar grafik berikut.

Gambar 3.9
Perkembangan Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Naional.

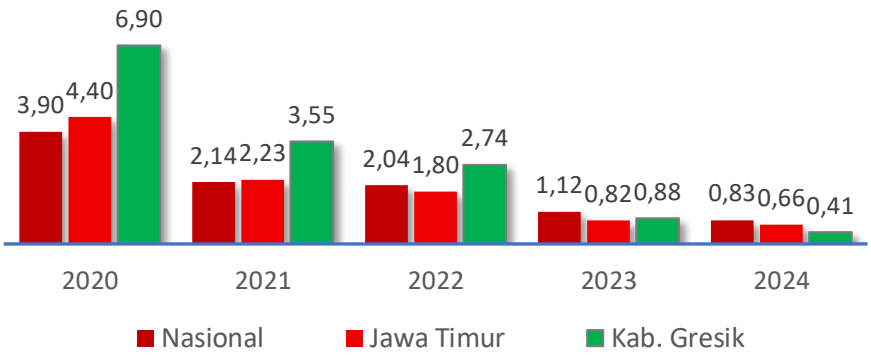

Sumber: *BPS, Susenas - data diolah*

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sudah lebih rendah (lebih baik) terhadap Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dari yang semula (tahun 2020) jauh lebih tinggi. Dengan demikian selama tahun 2020-2024 penurunan angka kemiskinan ektrem di Kabupaten Gresik juga lebih besar dibandingkan penurunan angka kemiskinan ektrem Provinsi maupun Nasional. Dimana angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik selama periode tersebut turun sebesar 6,49 persen poin, sedangkan Provinsi Jawa Timur turun sebesar 3,74 persen poin, sementara angka kemiskinan ekstrem Nasional turun sebesar 3,07 persen poin.

Dari seluruh uraian capaian kinerja pada Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Kemiskinan Ekstrem di atas, diperoleh data-data perkembangan capaian kinerja indikator-indikator tersebut selama tahun 2020-2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Perkembangan Capaian Kinerja P0, P1, P2, dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Penduduk Miskin	ribu jiwa	164,05	166,35	149,64	149,75	142,38	138,55
Persentase Penduduk Miskin (P0)	%	12,40	12,42	11,06	10,96	10,32	9,95
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	2,51	2,15	2,17	1,63	1,58	1,92
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,80	0,61	0,89	0,38	0,33	0,57
Kemiskinan Ekstrem	%	6,90	2,82	2,74	0,88	0,41	---

Sumber: *Publikasi BPS, Susenas – data di olah*

3.3. **Kondisi Bidang-Bidang terkait Isu Kemiskinan**.

Secara umum kemiskinan di Indonesia berkaitan erat dengan tidak meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tidak memadainya infrastruktur dasar (perumahan/permukiman), masalah ketenegakerjaan dan kewirausahaan, serta rentannya kecukupan pangan.

Kondisi indikator-indikator bidang terkait isu kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro digambarkan dengan cara melakukan: (i) analisis posisi relatif, dan (ii) analisis perkembangan antar waktu pada indikator indikator bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar (perumahan dan permukiman), dan kecukupan pangan, sehingga ditemukan indikator-indikator apa saja yang masih menjadi masalah di setiap bidang yang harus diprioritaskan (menjadi fokus intervensi penanggulangan kemiskinan).

3.3.1. Bidang Pendidikan.

Analisis terhadap indikator-indikator bidang pendidikan Kabupaten Gresik dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator utama bidang pendidikan selama tahun 2020-2024 (5 tahun terakhir), juga analisis posisi relatif capaian pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

1) Analisis perkembangan antar waktu.

Data perkembangan capaian indikator-indikator bidang pendidikan Kabupaten Gresik selama tahun 2020-2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Bidang Pendidikan
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian pada Tahun (dalam %)					Status
	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Partisipasi Murni SD/MI	98,82	99,37	97,39	97,66	97,10	
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	83,29	83,91	84,67	81,73	91,53	
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	79,71	80,48	78,07	76,00	74,89	
Angka Putus Sekolah Usia 7-12 tahun	3,25	1,87	0,27	0,16	0,06	
Angka Putus Sekolah Usia 13-15 tahun	5,12	4,33	3,32	0,17	0,39	
Angka Putus Sekolah Usia 16-18 tahun	6,51	5,53	4,47	3,18	2,92	
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,30	9,56	9,75	10,01	10,03	
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,73	13,77	13,96	13,97	13,98	
Angka Melek Huruf Penduduk 15^{+}	97,28	97,20	98,03	98,39	98,33	

Keterangan:

capaian tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 dan tahun 2020;

capaian tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 tetapi tidak lebih baik dari tahun 2020;

capaian tahun 2024 lebih buruk dari tahun 2023 meski lebih baik dari tahun 2020;

capaian tahun 2024 lebih buruk dari tahun 2023 dan tahun 2020.

Sumber: *Dinas Pendidikan Kab. Gresik – data di olah*

Berdasarkan tabel di atas, dari 9 (sembilan) indikator, indikator APM SD/MI dan indikator APM SMA/SMK/MA menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 tidak lebih baik (lebih randah) dari capaian tahun 2023, sekaligus menampilkan pola perkembangan antar waktu (tahun 2020-2024) dengan kecenderungan tren menurun/tidak membaik (berlabel merah), indikator ini perlu mendapat perhatian khusus untuk perbaikan capaian di masa mendatang.

Dua (2) indikator yaitu indikator Angka Putus Sekolah usia 13-15 tahun dan indikator Angka Melek Huruf penduduk usia 15^{+} menunjukkan capaian tahun 2024 tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi berdasarkan data deret waktu lima tahunan masih menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan tren membaik (berlabel kuning). Untuk indikator yang lainnya disamping menunjukkan capaian tahun 2024 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, juga telah menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan tren membaik.

2) Analisis posisi relatif terhadap Provinsi dan Nasional.

Capaian indikator-indikator bidang pendidikan di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Bidang Pendidikan, Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2024

Indikator	Capaian Tahun 2024		
	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Partisipasi Murni SD/MI	97,10	98,81	97,94
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	91,53	84,52	81,73
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	74,89	64,77	64,32
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	0,06	0,72	1,34

Lanjutan tabel 3.4

Indikator	Capaian Tahun 2024		
	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Putus Sekolah Usia 7-12 tahun	0,39	2,36	4,14
Angka Putus Sekolah Usia 13-15 tahun	2,92	25,93	27,13
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,03	8,28	8,85
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,98	13,13	13,21
Angka Melek Huruf Penduduk 15^{+}	98,33	93,37	96,29

Keterangan:
capaian Kabupaten/Kota lebih baik dari Provinsi dan Nasional;
capaian Kabupaten/Kota diantara capaian Provinsi dan Nasional;
capaian Kabupaten/Kota lebih buruk dari Provinsi dan Nasional.

Sumber: *Dinas Pendidikan Kab. Gresik – data di olah*

Dari tabel di atas, hampir seluruh indikator menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian Provinsi dan Nasional (berlabel hijau), kecuali pada indikator Angka Partisipasi Murni SD/MI yang berlabel merah. Indikator dengan label merah perlu menjadi perhatian serius sebagai prioritas perbaikan di masa mendatang.

3.3.2. Bidang Kesehatan.

Analisis terhadap indikator-indikator bidang kesehatan Kabupaten Gresik dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator utama bidang kesehatan selama tahun 2020-2024, juga analisis posisi relatif capaian pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

1) Analisis perkembangan antar waktu.

Data perkembangan capaian indikator-indikator bidang kesehatan Kabupaten Gresik selama tahun 2019-2023 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5

Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian pada Tahun					Status
	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Kematian Neonatal /1000 kh	2,51	3,26	4,10	4,60	3,80	
Angka Kematian Bayi /1000 kh	2,66	3,47	4,34	4,80	4,30	
Angka Kematian Balita /1000 kh	0,05	0,05	4,40	4,80	4,40	
Angka Kematian Ibu /100 ribu kh	59,09	315,76	94,18	99,38	77,59	
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,17	0,14	0,20	0,20	0,29	
Prevalensi Balita Stunting (%)	11,04	10,90	9,61	6,60	5,32	
Imunisasi Dasar Lengkap (%)	107,70	104,70	98,80	96,10	98,80	
Persalinan di Fasyankes (%)	93,10	90,20	89,00	88,40	83,30	
Rasio Bidan /100 ribu penduduk	67,85	88,00	75,30	86,37	90,00	
Usia Harapan Hidup (tahun)	73,66	73,67	73,96	74,24	74,48	

Keterangan:

- capaian tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 dan tahun 2020;
- capaian tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 tetapi tidak lebih baik dari tahun 2020;
- capaian tahun 2024 lebih buruk dari tahun 2023 meski lebih baik dari tahun 2020;
- capaian tahun 2024 lebih buruk dari tahun 2023 dan tahun 2020.

Sumber: *Dinas Kesehatan Kab. Gresik – data di olah*

Berdasarkan tabel di atas, dari 10 (sebpuluh) indikator, 2 (dua) indikator yaitu indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk; dan indikator Persalinan di Fasyankes menunjukkan capaian kinerja tahun 2024

tidak lebih baik dari tahun 2023, sekaligus menampilkan pola perkembangan antar waktu (tahun 2020-2024) dengan kecenderungan tren tidak membaik (berlabel merah), indikator ini perlu mendapat prioritas perhatian utama guna perbaikan capaian di masa mendatang.

Indikator Angka Kematian Neonatal (AKN); Angka Kematian Bayi (AKB); Angka Kematian Bayi (AKBa), Angka Kematian Ibu (AKI); dan indikator Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi meski menunjukkan capaian tahun 2024 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, akan tetapi berdasarkan data deret waktu lima tahunan masih menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan tren tidak membaik (berlabel hijau).

Sementara indikator Prevalensi Stunting; Rasio Bidan dan indikator Usia Harapan Hidup telah menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya sekaligus menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan tren yang membaik pula (berlabel biru).

2) Analisis posisi relatif terhadap Provinsi dan Nasional.

Capaian indikator-indikator bidang kesehatan di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi

Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Bidang Kesehatan, Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2024

Indikator	Capaian Tahun 2024		
	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Kematian Neonatal /1000 kh	3,80	5,50	6,83
Angka Kematian Bayi /1000 kh	4,30	6,40	8,05
Angka Kematian Balita /1000 kh	4,40	6,40	3,44
Angka Kematian Ibu /100 ribu kh	77,59	484,00	110,64
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,29	0,62	8,05
Prevalensi Balita Stunting (%)	5,32	5,23	7,06
Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi (%)	98,80	87,09	90,63
Persalinan di Fasilitas Layanan Kesehatan (%)	83,30	99,03	96,81
Rasio Bidan /100 ribu penduduk	90,00	79,00	118,87
Usia Harapan Hidup (tahun)	74,48	75,07	74,15

Keterangan:
- capaian Kabupaten/Kota lebih baik dari Provinsi dan Nasional;
- capaian Kabupaten/Kota diantara capaian Provinsi dan Nasional;
- capaian Kabupaten/Kota lebih buruk dari Provinsi dan Nasional.

Sumber: *Dinas Kesehatan Kab. Gresik – data di olah*

Dari tabel di atas, hanya indikator Persalinan/Kelahiran dilakukan di Fasilitas Layanan Kesehatan menunjukkan capaian yang tidak lebih baik dari capaian Provinsi dan Nasional (berlabel merah). Sementara itu indikator indikator lainnya telah menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian Provinsi dan Nasional.

3.3.3. Bidang Ketenagakerjaan.

Analisis terhadap indikator-indikator bidang ketenagakerjaan Kabupaten Gresik dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator utama bidang ketenagakerjaan selama kurun waktu tahun 2020-2024 (5 tahun terakhir), juga analisis posisi relatif capaian pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

1) Analisis perkembangan antar waktu.

Data perkembangan capaian indikator bidang ketenagakerjaan Kabupaten Gresik selama tahun 2020-2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian pada Tahun (dalam %)					Status
	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,53	69,43	68,30	70,12	71,61	
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,21	8,00	7,84	6,82	6,45	
Penduduk Idle	25,67	23,27	24,33	21,84	22,82	

Keterangan:
- capaian tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 dan tahun 2020;
- capaian tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 tetapi tidak lebih baik dari tahun 2020;
- capaian tahun 2024 lebih buruk dari tahun 2023 meski lebih baik dari tahun 2020;
- capaian tahun 2024 lebih buruk dari tahun 2023 dan tahun 2020.

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

Berdasarkan tabel di atas, indikator TPAK, dan indikator TPT menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 lebih baik terhadap tahun 2023 dan tahun 2020 sehingga menampilkan pola perkembangan antar waktu (2020-2024) dengan kecenderungan tren membaik (berlabel biru). Sementara itu indikator Penduduk *idle* meski masih menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan tren membaik, tetapi capaian tahun 2024 tidak lebih baik dari tahun 2023 (berlabel kuning).

2) Analisis posisi relatif terhadap Provinsi dan Nasional.

Capaian indikator bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Bidang Ketenagakerjaan, Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2024

Indikator	Capaian Tahun 2024		
	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,61	73,45	70,69
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,45	4,88	4,91
Penduduk *Idle*	22,82	19,86	20,03

Keterangan:
- capaian Kabupaten/Kota lebih baik dari Provinsi dan Nasional;
- capaian Kabupaten/Kota diantara capaian Provinsi dan Nasional;
- capaian Kabupaten/Kota lebih buruk dari Provinsi dan Nasional.

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

Dari tabel di atas, 2 indikator perlu perhatian serius karena berlabel merah yaitu indikator TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan indikator Penduduk *idle*. Kedua inikator ini memiliki capaian yang tidak lebih baik terhadap capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sementara indikator TPAK (Tingkat Partisipasi Anggakat Kerja) menjadi prioritas berikutnya mengingat indikator ini menunjukkan status dengan label kuning.

3.3.4. Bidang Infrastruktur Dasar.

Analisis terhadap indikator-indikator bidang infrastruktur dasar di Kabupaten Gresik dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator utama bidang infrastruktur dasar selama kurun waktu tahun 2020-2024 (5 tahun terakhir), juga analisis posisi relatif capaian pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

1) Analisis perkembangan antar waktu.

Data perkembangan capaian indikator-indikator bidang infrastruktur dasar Kabupaten Gresik selama tahun 2020-2024 adalah sebagai-mana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9

Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Bidang Infrastruktur dasar Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian pada Tahun (dalam %)					Status
	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ruta dgn Akses Air Minum Layak	94,63	88,99	91,50	98,85	98,86	
Ruta dgn Akses Sanitasi Layak	93,15	91,56	90,29	95,00	95,28	
Ruta dgn Akses Listrik (PLN, non PLN)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Ruta dg Kepemilikan Rumah Milik Sendiri	85,01	90,63	93,07	93,14	91,48	
Rumah Tidak Layak Huni	19,75	28,70	28,00	27,90	18,53	

Keterangan:

- capaian tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 dan tahun 2020;
- capaian tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 tetapi tidak lebih baik dari tahun 2020;
- capaian tahun 2024 lebih buruk dari tahun 2023 meski lebih baik dari tahun 2020;
- capaian tahun 2024 lebih buruk dari tahun 2023 dan tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, hampir seluruh indikator menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 lebih baik terhadap tahun 2023 dan tahun 2020 sehingga menampilkan pola perkembangan antar waktu (2020-2024) dengan kecenderungan tren membaik (berlabel biru), kecuali pada indikator Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri yang menunjukkan status dengan label kuning, karena pada indikator ini meskipun masih menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan tren membaik (meningkat), akan tetapi capaian tahun 2024 tidak lebih baik dari tahun 2023, sehingga indikator ini masih perlu menjadi perhatian perbaikan capaian di masa mendatang.

2) Analisis posisi relatif terhadap Provinsi dan Nasional.

Capaian indikator-indikator bidang infrastruktur dasar di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Bidang Infrastruktur dasar, Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2024

Indikator	Capaian Tahun 2024		
	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Ruta dengan Akses Air Minum Layak	98,86	96,93	92,64
Ruta dengan Akses Sanitasi Layak	95,28	85,56	83,60
Ruta dengan Akses Listrik (PLN & non PLN)	100,00	99,71	99,48
Ruta dgn Kepemilikan Rumah Milik Sendiri	91,48	90,93	84,95
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	18,53	26,60	36,85

Keterangan:
capaian Kabupaten/Kota lebih baik dari Provinsi dan Nasional;
capaian Kabupaten/Kota diantara capaian Provinsi dan Nasional;
capaian Kabupaten/Kota lebih buruk dari Provinsi dan Nasional.

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

Dari tabel di atas, seluruh indikator telah menunjukkan capaian dengan status label hijau yang berarti bahwa capaian Kabupaten Gresik sudah lebih baik dari capaian Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional.

3.3.5. Bidang Ketahanan Pangan.

Analisis terhadap indikator-indikator bidang ketahanan pangan di Kabupaten Gresik dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator utama bidang ketahanan pangan selama kurun waktu tahun 2020-2024 (5 tahun terakhir), juga analisis posisi relatif capaian pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

1) Analisis perkembangan antar waktu.

Data perkembangan capaian indikator bidang ketahanan pangan Kabupaten Gresik selama tahun 2020-2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11

Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian pada Tahun (dalam %)					Status
	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	4,43	4,59	6,60	3,67	2,90	
Produktivitas Padi	60,84	61,84	64,98	65,72	62,30	

Keterangan:

- capaian tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 dan tahun 2020;
- capaian tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 tetapi tidak lebih baik dari tahun 2020;
- capaian tahun 2024 lebih buruk dari tahun 2023 meski lebih baik dari tahun 2020;
- capaian tahun 2024 lebih buruk dari tahun 2023 dan tahun 2020.

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

Berdasarkan tabel di atas, indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) menunjukkan capaian kinerja tahun 2024 lebih baik (lebih rendah) terhadap tahun 2023 dan tahun 2020 sehingga menampilkan pola perkembangan antar waktu (2020-2024) dengan kecenderungan tren membaik (menurun). Sementara itu indikator Produktivitas Padi meski menampilkan pola perkembangan antar waktu (2020-2024) dengan kecenderungan tren membaik (meningkat), akan tetapi capaian tahun 2024 tidak lebih baik (lebih rendah) dari tahun 2023, sehingga berlabelkan kuning.

2) Analisis posisi relatif terhadap Provinsi dan Nasional.

Capaian indikator-indikator bidang ketahanan pangan di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Bidang Ketahanan Pangan, Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2024

Indikator	Capaian Tahun 2024		
	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	2,90	8,40	8,27
Produktivitas Padi	62,30	57,33	52,90

Keterangan:
capaian Kabupaten/Kota lebih baik dari Provinsi dan Nasional;
capaian Kabupaten/Kota diantara capaian Provinsi dan Nasional;
capaian Kabupaten/Kota lebih buruk dari Provinsi dan Nasional.

Sumber: *Publikasi BPS – data di olah*

Dari tabel di atas, seluruh indikator menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik terhadap capaian Provinsi maupun Nasional.

3.4. **Prioritas Intervensi**.

Penentuan prioritas intervensi pada indikator-indikator bidang terkait isu kemiskinan dilakukan dengan menggunakan permodelan diagram kartesius (*graphic xy scatter*). Dalam kuadran tersebut Sumbu x adalah nilai nol (0) dari capaian dan perkembangan antar waktu, sedangkan sumbu y adalah titik nol (0) dari capaian Provinsi Jawa Timur. Setiap indikator bidang diposisikan sebagai koordinat $(x;y)$ dimana nilai x adalah gabungan gabungan dari selisih capaian capaian indikator bidang pada tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya dan nilai perkembangan antar waktu (selinih antara capaian tahun 2024 dan tahun 2020), sedangkan nilai y adalah selisih indikator terhadap capaian provinsi.

Setiap indikator bidang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) klasifikasi yang masing-masing akan menentukan suatu bidang kuadran akan menjadi prioritas 1, 2, 3, ataukah prioritas 4.

Klasifikasi pertama disebut kualifikasi lebih tinggi/naik: untuk capaian dan perkembangan antar waktu, dinyatakan lebih baik bila gabungan selisih capaian indikator tahun 2024 dengan tahun 2023 dan selisih capaian indikator tahun 2024 dengan tahun 2020 menghasilkan nilai positif sedangkan pada posisi relatif dinyatakan lebih baik bila capaian suatu indikator lebih besar dari capaian Provinsi, demikian sebaliknya dinyatakan tidak lebih baik. Dengan kondisi ini maka sebagai:

- Prioritas 1: jika nilai capaian dan perkembangan antar waktu serta posisi relatif tehadap provinsi keduanya menunjukkan klasifikasi tidak lebih baik;
- Prioritas 2: jika nilai capaian dan perkembangan antar waktu menunjukkan klasifikasi lebih baik, sedangkan posisi relatif tehadap provinsi menunjukkan klasifikasi tidak lebih baik;
- Prioritas 3: jika nilai capaian dan perkembangan antar waktu menunjukkan klasifikasi tidak lebih baik, sedangkan posisi relatif tehadap provinsi menunjukkan klasifikasi lebih baik; dan
- Prioritas 4: jika nilai capaian dan perkembangan antar waktu serta posisi relatif tehadap provinsi keduanya menunjukkan menunjukkan klasifikasi lebih baik.

Berdasarkan data-data capaian indikator bidang dengan klasifikasi lebih tinggi/naik dan data capaian indikator yang sama di Provinsi, maka dapat disajikan gambar diagram kuadran sebagaiman berikut.

Gambar 3.10
Prioritas Intervensi terhadap Indikator Bidang dengan Kualifikasi Lebih Tinggi / Meningkat

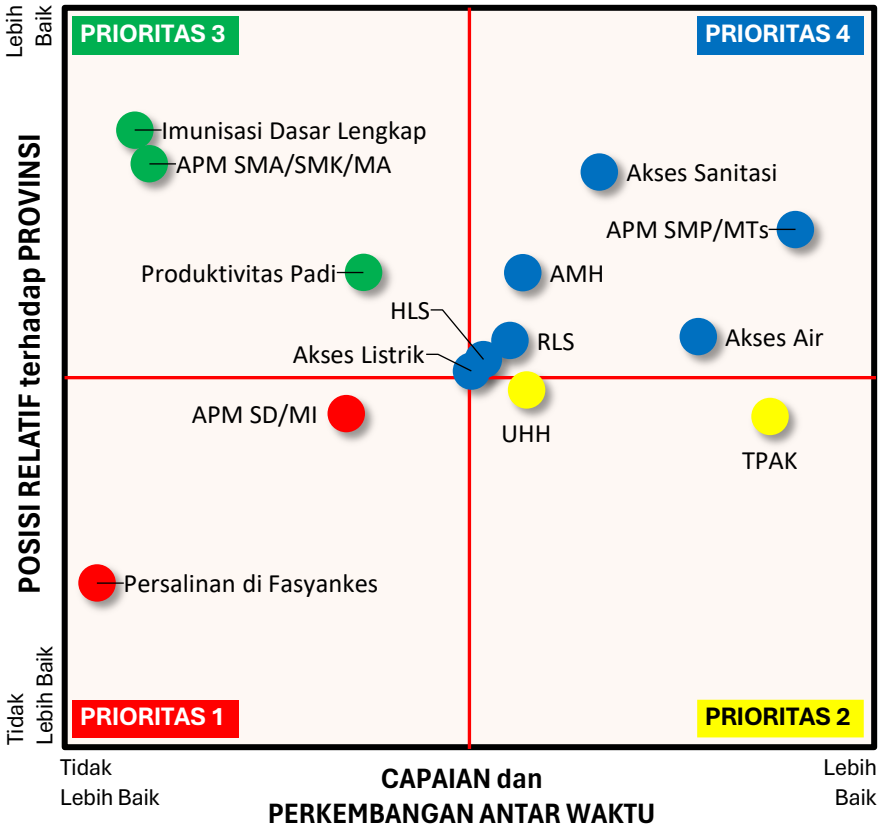

Berdasarkan gambar diagram di atas, sebagai prioritas 1 adalah indikator APM SD/MI dan Persalinan di Fasyankes, sedangkan sebagai prioritas 2 adalah indikator TPAK dan UHH.

Klasifikasi kedua disebut kualifikasi lebih rendah/turun : untuk capaian dan perkembangan antar waktu, dinyatakan lebih baik bila gabungan

selisih capaian indikator tahun 2024 dengan tahun 2023 dan selisih capaian indikator tahun 2024 dengan tahun 2020 menghasilkan nilai negatif sedangkan pada posisi relatif dinyatakan lebih baik bila capaian suatu indikator lebih rendah dari capaian Provinsi, demikian sebaliknya dinyatakan tidak lebih baik. Dengan kondisi ini maka sebagai:

- Prioritas 1: jika nilai capaian dan perkembangan antar waktu serta posisi relatif tehadap provinsi keduanya menunjukkan klasifikasi tidak lebih baik;
- Prioritas 2: jika nilai capaian dan perkembangan antar waktu menunjukkan klasifikasi lebih baik, sedangkan posisi relatif tehadap provinsi menunjukkan klasifikasi tidak lebih baik;
- Prioritas 3: jika nilai capaian dan perkembangan antar waktu menunjukkan klasifikasi tidak lebih baik, sedangkan posisi relatif tehadap provinsi menunjukkan klasifikasi lebih baik; dan
- Prioritas 4: jika nilai capaian dan perkembangan antar waktu serta posisi relatif tehadap provinsi keduanya menunjukkan menunjukkan klasifikasi lebih baik..

Berdasarkan data-data capaian indikator bidang dengan klasifikasi lebih tinggi/naik dan data capaian indikator yang sama di Provinsi, maka dapat disajikan gambar diagram kuadran sebagaiman berikut.

Gambar 3.11
Prioritas Intervensi terhadap Indikator Bidang
dengan Kualifikasi Lebih Rendah / Menurun

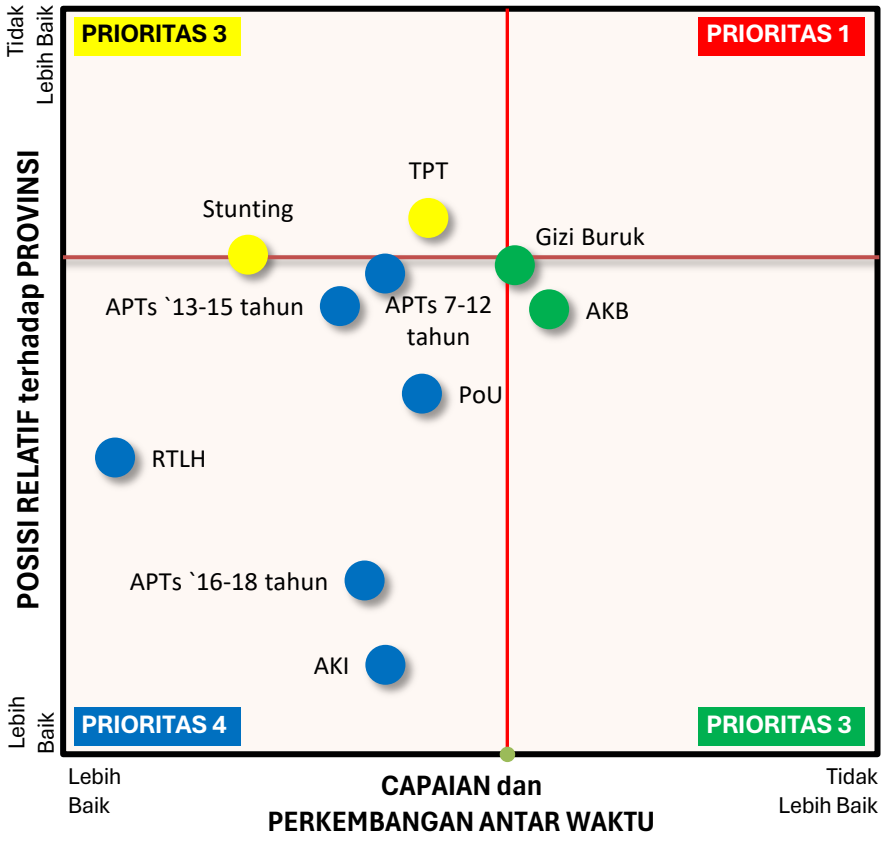

Berdasarkan gambar diagram di atas, tidak terdapat indikator sebagai prioritas 1, adapun indikator Stunting dan indikator TPT yang berada pada prioritas 2 dapat dinyatakan sebagai prioritas utama.

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah

4

Prioritas Program dan Lokasi Prioritas

dokumen

RPKD 2025-2029
Kabupaten Gresik

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM dan LOKASI PRIORITAS

4.1. Analisis Akar Masalah.

Analisis akar masalah merupakan analisis lebih mendalam setelah meng-gambarkan kondisi umum kemiskinan daerah atau disebut juga sebagai analisis determinan kemiskinan. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada setiap bidang selanjutnya akan dijadikan prioritas kebijakan. Untuk itu sebelum melakukan intervensi perlu mencari tahu akar masalah dari setiap permasalahan pada setiap bidang tersebut.

Akar masalah dari determinan kemiskinan dapat diperoleh melalui analisis dengan mempertimbangkan: (i) aspek ketersediaan/*supply side*; yaitu aspek dari sisi terpenuhinya tanggung jawab pemerintah baik berupa program maupun kebijakan dan pemenuhan sarana pra-sarana layanan kepada masyarakat, dan (ii) aspek pemanfaatan/ *demand side*; yaitu aspek dari sisi masyarakat, yaitu bagaimana sarana, prasarana, program dan kegiatan yang sudah disediakan pemerintah dimanfaatkan oleh masyarakat, adakah hambatan-hambatan dari sisi masyarakat yang membuat pelayanan yang

disediakan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan atau tidak optimal dimanfaatkan. Hambatan- hambatan tersebut dapat bersumber dari persoalan ekonomi, sosial, dan budaya.

4.1.1. Kemiskinan Makro.

Dari analisis/identifikasi masalah kemiskinan pada 3 indikator makro (kemiskinan konsumsi), yaitu: Persentase Penduduk Miskin (P0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) meski telah mengalami penurunan (lebih baik) dari tahun sebelumnya, tetapi masih menunjukkan bahwa secara posisi relatif capaian ketiga indikator tersebut tidak lebih baik terhadap capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional (lebih tinggi dari Provinsi maupun Nasional). Bahkan jika dilihat dari sisi persentase penduduk miskin, dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik menempati urutan ke 15 dari tertinggi. Dengan demikian, permasalahan kemiskinan Kabupaten Gresik adalah bagaimana menurunkan angka persentase penduduk miskin, mengatasi penduduk miskin agar tidak semakin terpuruk ke dalam jurang kemiskinan (memperkecil jarak dengan garis kemiskinan), dan mempersempit kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin.

Apabila dilihat dari aspek ketersediaan dan pemanfaatan terkait dengan kondisi kemiskinan makro adalah sebagai berikut:

a) Aspek ketersediaan:

- belum maksimalnya jangkauan program perlindungan sosial dalam upaya melindungi pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, utamanya terkait pelayanan pendidikan, infrastruktur dasar. infrastruktur dasar dan kebutuhan pokok bahan pangan.
- belum maksimalnya sinergitas dan komplementaritas upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik.

b) Aspek Pemanfaatan:

- rendahnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan khususnya rumah tangga pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.

Tabel 4.1

Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kab. Gresik menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40 persen Terbawah	40 persen Tengah	20 persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	Rp 338.517	Rp 582.704	Rp 1.001.469
Bukan Makanan	Rp 280.686	Rp 510.876	Rp 1.371.614
Jumlah	Rp 619.203	Rp 1.093.580	Rp 2.373.083

Sumber: *BPS, Ststistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Gresik 2024, diolah*

Dari tabel 4.1 di atas nampak bahwa pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah memiliki kemampuan rata-rata pengeluaran hanya sebesar Rp. 619.203 per kapita sebulan, angka ini hanya sedikit di atas garis kemiskinan Kabupaten Gresik tahun 2024 yang sebesar Rp. 608.828 per kapita sebulan.

- rendahnya daya saing kegiatan ekonomi, yang diakibatkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan teknis dan terbatasnya akses pasar bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengatasi kompleksitas permasalah-an kemiskinan.

Gambar 4.1
Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Miskin Usia 15 th ke atas Kab. Gresik

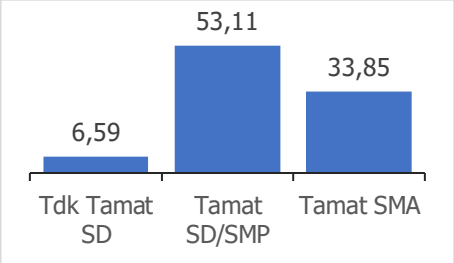

Sumber: *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Gresik 2024*

- perilaku sebagian masyarakat pada saat Pemerintah menyalurkan bantuan untuk masyarakat miskin, kelompok ini berbondong-bondong mengaku miskin (bahkan mengaku lebih miskin bila dibandingkan lainnya).

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka program-program yang dapat dirancang sebagai upaya penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik dengan didasarkan pada teori perubahan (TOC) adalah sebagaimana disajikan pada bagan berikut.

Gambar 4.2

Teori Perubahan (TOC) untuk Penurunan Angka Kemiskinan

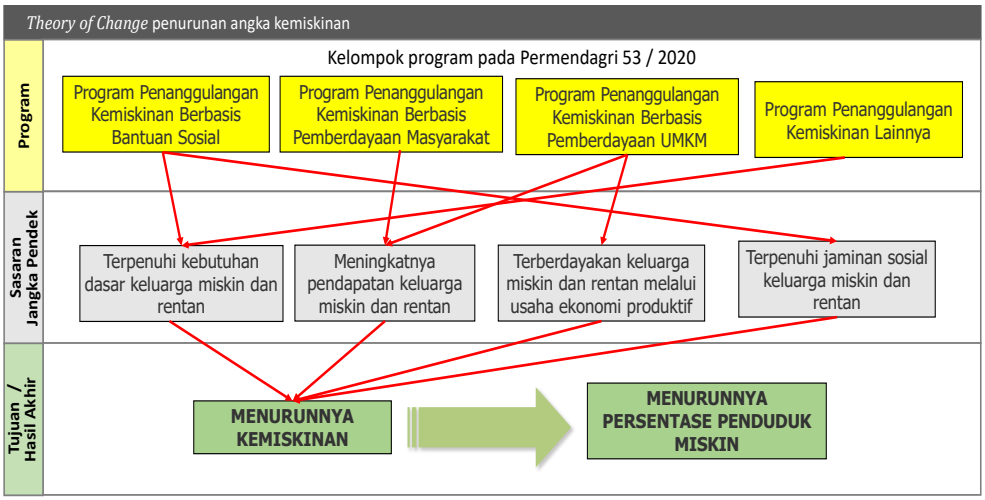

4.1.2. Bidang-Bidang terkait Isu Kemiskinan.

1) Bidang Pendidikan.

Analisis/identifikasi isu kemiskinan terhadap 9 (sembilan) indikator bidang pendidikan menunjukkan hasil hanya APM SD/MI menunjukkan hasil tidak lebih baik pada capaian dan perkembangan antar waktu serta posisi relatif terhadap provinsi, sehingga menempatkan pada posisi prioritas 1 untuk mendapatkan upaya perbaikan.

Meski berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan pendidikan menengah atas (SMA dan SMK) menjadi kewenangan Provinsi, akan tetapi indikator RLS dan indikator HLS akan naik jika angka pada indikator APM (termasuk APM SMA/SMK/MA) juga meningkat dengan signifikan. Oleh karena itu permasalahan APM SMA/SMK/MA sederajat tetap

dipandang menjadi permasalahan di tingkat Kabupaten, tentunya dengan bentuk penyelesaian yang bersifat non teknis. Dan dari hasil analisis/identifikasi menempati posisi prioritas 3, mengingat dari posisi relatif terhadap provinsi masih menunjukkan hasil tidak lebih baik, meski secara capaian dan perkembangan antar waktu telah lebih baik.

Permasalahan Angka Partisipasi Murni demikian juga Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Ssekolah pada bidang pendidikan yaitu masih terdapat anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi (putus sekolah). Terutama pada anak usia 16-18 tahun.

Gambar 4.3
Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7 - 18 Th
Kabupaten Gresik

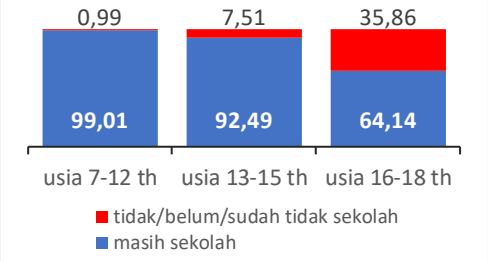

Sumber: *Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Jatim 2024*

Bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan, permasalahan isu kemiskinan pada bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

a) Aspek ketersediaan:

- lemahnya regulasi yang mengakomodir peserta didik miskin.
- kendala bagi pemerintah Kabupaten untuk melakukan intervensi terhadap SMA/SMK dan SLB, karena jenjang tersebut menjadi kewenangan Provinsi.

- belum meratanya cakupan BSM (Bantuan Siswa Miskin).
- belum dimanfaatkannya secara maksimal data sasaran jumlah anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah.

b) Aspek pemanfaatan:

- rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat berakibat antara lain anak usia sekolah terpaksa menjadi tulang punggung keluarga dan kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan anak untuk mengikuti Pendidikan.
- masih terdapat anak usia sekolah 13-18 tahun dengan motivasi belajar/sekolah yang rendah disebabkan oleh faktor lingkungan pergaulan maupun budaya.
- masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa anak yang hanya tamat SMP dan begitu juga SMA pada akhirnya juga bekerja, sehingga lebih baik putus sekolah hanya sampai pendidikan SMP kemudian bekerja dibanding melanjutkan ke pendidikan SMA.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka program-program yang dapat dirancang sebagai upaya-upaya penanganan permasalahan bidang pendidikan di Kabupaten Gresik dengan berdasar pada teori perubahan (TOC) adalah sebagaimana disajikan pada bagan berikut.

Gambar 4.4

Teori Perubahan (TOC) untuk Bidang Pendidikan

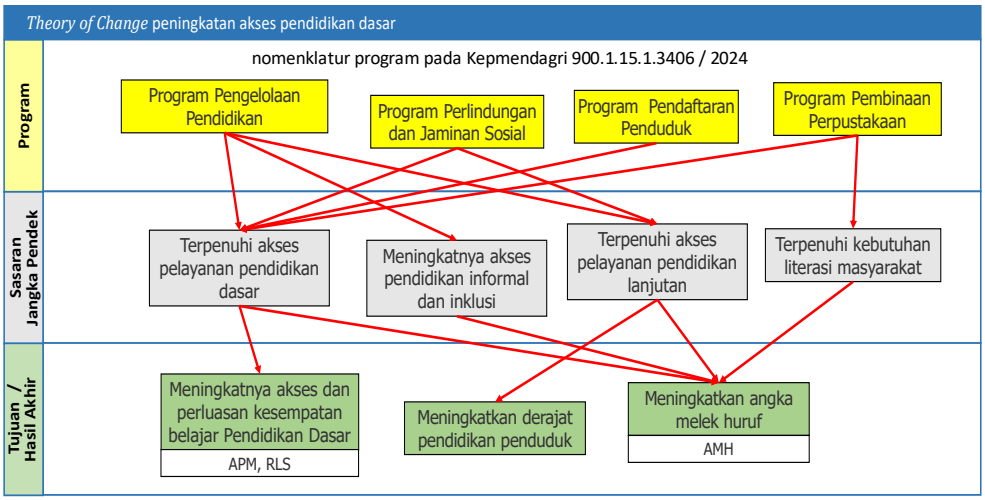

2) Bidang Kesehatan.

Analisis/identifikasi isu kemiskinan terhadap 10 (sepuluh) indikator bidang kesehatan, indikator Persalinan di lakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menunjukkan hasil tidak lebih baik pada posisi relatif terhadap provinsi, demikian juga dengan capaian dan perkembangan antar waktu, sehingga menempatkan posisi indikator ini sebagai prioritas 1. Sementara itu untuk indikator UHH (Usia Harapan Hidup), meski hasil analisis/ identifikafi menunjukkan hasil lebih baik pada capaian dan perkem-bangan antar waktu, tertapi posisi relatif terhadap provinsi masih tidak lebih baik, sehingga indikator insi berada pada prioritas 2.

Permasalahan bidang kesehatan bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:

a) Aspek ketersediaan:

- belum optimalnya penanganan komplikasi kebidanan.
- belum meratanya upaya kesehatan masyarakat, maupun upaya kesehatan perorangan.
- tingginya beban kerja tenaga medis puskesmas di luar pelayanan kesehatan.

b) Aspek pemanfaatan:

- rendahnya kemampuan orang tua (miskin) sehingga perhatian terhadap kesehatan bayi dan balita kurang menjadi prioritas dalam pembiayaan ekonomi rumah tangga.
- kasus-kasus pernikahan dini yang diikuti kehamilan usia dini.
- kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, terutama di pedesaan dan desa-desa terpencil.
- adanya budaya masyarakat terutama di desa-desa terpencil yang tidak mendukung kesehatan ibu hamil.
- rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit penyerta kehamilan seperti eklampsia, pre-eklampsia, hipertensi dan jantung.
- adanya migrasi ibu hamil menyebabkan tidak terkontrolnya riwayat pemeriksaan kehamilan.

- masih adanya hak dan kebebasan masyarakat untuk tidak pernah dibatasi jumlah anak.
- masih adanya budaya lebih mendahulukan kebutuhan gizi kepala keluarga terutama di daerah pedesaan.
- masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan peri-laku hidup bersih dan sehat (PHBS) termasuk pola asupan makanan bayi, terutama di pedesaan, pesisir, dan desa terpencil.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka program-program yang dapat dirancang sebagai upaya penanganan masalah bidang kesehatan di Kabupaten Gresik dengan didasarkan pada teori perubahan (TOC), sebagaimana disajikan pada bagan berikut.

Gambar 4.5

Teori Perubahan (TOC) untuk Bidang Kesehatan

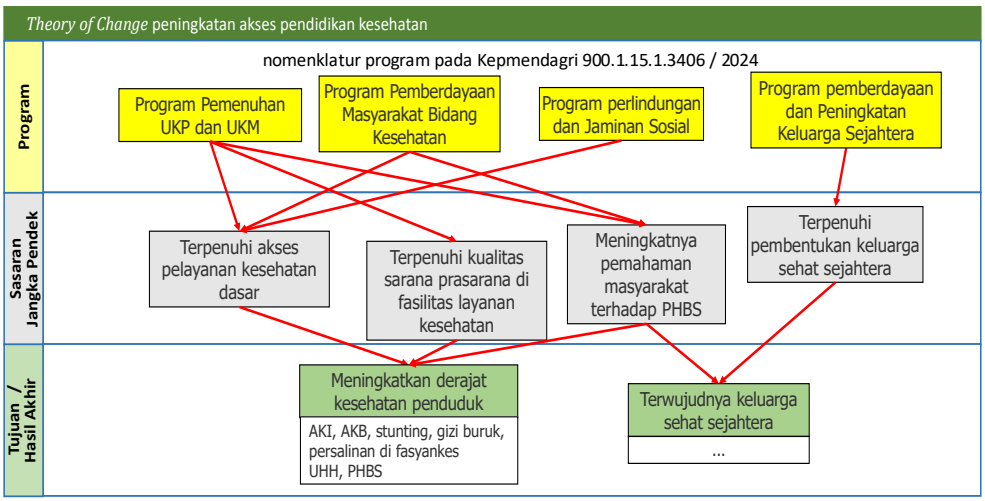

3) Bidang Ketenagakerjaan.

Analisis/identifikasi terhadap TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan penduduk usia kerja idle menunjukkan jika hanya indikator TPT yang meski posisi relatif capaian indikator ini sudah lebih baik terhadap capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, akan tetapi pola perkembangan antar waktu masih menampilkan kecenderungan tren yang sedikit meningkat

Bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:

a) Aspek ketersediaan:

- belum kondusifnya situasi ekonomi (kususnya setelah masa pandemi Covid 19) dalam mendukung iklim investasi.
- terbatasnya ketersediaan investasi yang bersifat padat karya.
- belum optimalnya pengelolaan potensi wilayah dan SDA.
- penyediaan dan pembinaan pelatihan/kompetensi tenaga kerja kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- keterbatasan penyediaan lapangan kerja/lembaga penyalur kerja.

b) Aspek Pemanfaatan:

- kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peluang kerja.

- rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan informasi kesempatan kerja.
- rendahnya ketrampilan pencari kerja berbasis kompetensi.
- rendahnya tingkat pendidikan, data BPS hasil sakernas 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar (54,97%) pengangguran di Kabupaten Gresik memiliki tingkat pendidikan hanya sampai SLTP, 40,24 persen dengan pendidikan hinga SLTA, dan hanya 4,78 persen yang berpendidikan hingga sarjana.
- rendahnya minat masyarakat untuk meningkatkan kompetensi.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka program-program yang dapat dirancang sebagai upaya penanganan masalah bidang ketenagakerjaan Kabupaten Gresik dengan didasarkan pada teori perubahan (TOC), sebagaimana disajikan pada bagan berikut.

Gambar 4.6

Teori Perubahan (TOC) untuk Bidang Ketenagakerjaan

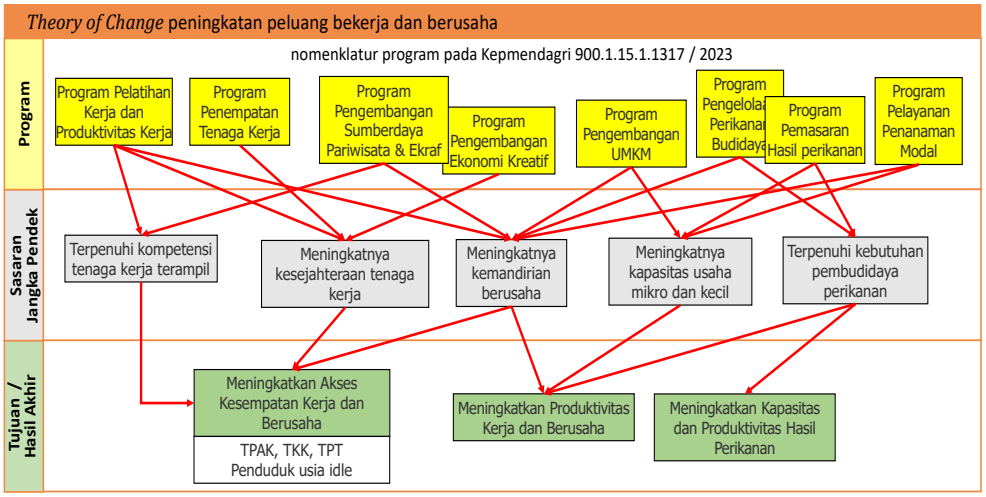

4) Bidang Infrastruktur Dasar.

Analisis/identifikasi terhadap isu kemiskinan bidang perumahan dan permukiman menunjukkan bahwa meski seluruh indikator telah menunjukkan hasil yang lebih baik terhadap capaian Provinsi dan Nasional, akan tetapi pada indikator rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri masih yang menunjukkan pola perkembangan antar waktu masih menampilkan kecenderungan tren yang sedikit menurun.

Permasalahan kemiskinan bidang perumahan dan permukiman bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:

a) Aspek ketersediaan:

- lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan.
- belum optimalnya data dasar sebagai penentu zona sanitasi prioritas berdasarkan urutan potensi risiko kesehatan lingkungan/ area risiko sanitasi.
- belum berdayanya lembaga pengelola sanitasi.

b) Aspek pemanfaatan:

- rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketentuan teknis pengelolaan air limbah terutama jarak resapan air pembuangan dengan sumber air bersih.
- rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pola hidup bersih dan sehat khususnya tidak BAB di sembarang tempat dan tidak membuang limbah ke badan air.
- kondisi ekonomi keluarga terutama yang tinggal di daerah kumuh menjadi salah satu kendala penyediaan sanitasi yang layak.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka program-program yang dapat dirancang sebagai upaya dalam penanganan permasalahan bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Gresik dengan didasarkan pada teori perubahan (TOC) adalah sebagaimana disajikan pada bagan berikut.

Gambar 4.7

Teori Perubahan (TOC) untuk Bidang Infrastruktur Dasar

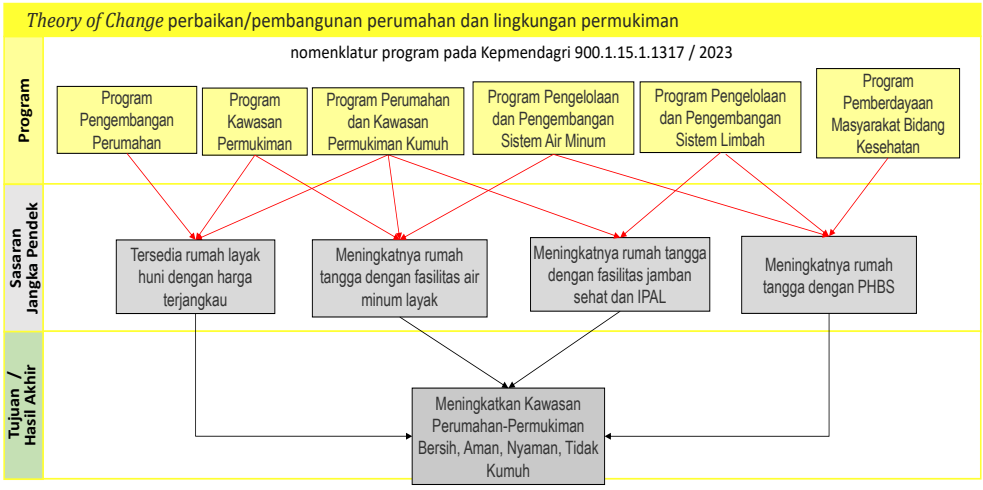

5) Bidang Ketahanan Pangan.

Produksi / ketersediaan bahan pangan:

Permasalahan produksi/ketersediaan bahan pangan bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:

a) Aspek ketersediaan:

- data base petani dan produksi pertanian (bahan pangan).
- permasalahan aturan tata niaga pertanian.
- belum optimalnya aksesibilitas (jalan, irigasi, energi, air, pasar).
- belum maksimal pemanfaatan teknologi pertanian modern spesifik lokasi oleh pemerintah dari sumber-sumber teknologi.
- belum adanya kebijakan untuk menyediakan penelitian dan pengembangan pertanian.
- peran pemerintah belum maksimal dalam pemanfaatan tenaga ahli pertanian terutama dari lembaga riset dan teknologi.

b) Aspek pemanfaatan:

- kualitas dan kuantitas SDM pada sektor pertanian masih rendah.
- usaha pertanian masih kecil sekali dan terpencar-pencar, petani masih sulit bersatu.
- kebutuhan ekonomi yang mendesak dalam jumlah besar, mendorong petani dengan mudah melepas aset lahan pertanian.

- semakin berkurangnya minat generasi muda di sektor pertanian.
- tawaran pekerjaan non-pertanian dengan penghasilan rutin mendorong alih profesi petani.

Perkembangan harga kebutuhan pokok pangan:

Permasalahan perkembangan harga kebutuhan pokok pangan dilihat dari aspek ketersediaan dan pemanfaatan adalah sebagai berikut:

a) Aspek ketersediaan:
   - mekanisme pengendalian distribusi kebutuhan pokok pangan (terutama beras), serta panjangnya rantai distribusi.
   - belum optimalnya penggunaan DAMISDA dalam pensasaran pelaksanaan program BPNT.
   - belum optimalnya aksesibilitas (jalan, transportasi, pasar).
   - belum memiliki program dan kebijakan yang melibatkan warga mampu dalam membantu mencukupi kebutuhan pangan bagi warga yang tidak mampu.

b) Aspek pemanfaatan:
   - beras masih menjadi bahan kebutuhan makanan pokok utama.
   - rendahnya diversifikasi pangan masyarakat.
   - rendahnya pendapatan penduduk miskin.

- sikap mental yang merasa miskin dan harus mendapatkan bantuan, semisal BPNT.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka program yang dapat dirancang sebagai upaya penanganan permasalahan bidang ketahanan pangan dengan didasarkan pada teori perubahan (TOC) adalah sebagaimana disajikan pada gambar bagan berikut.

Gambar 4.8
Teori Perubahan (TOC) untuk Bidang Ketahanan Pangan

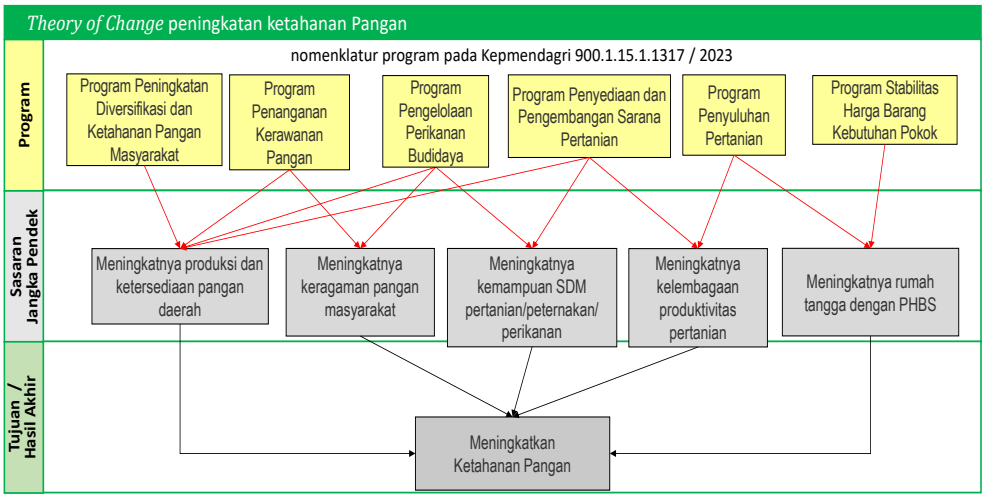

Berdasarkan seluruh uraian analisis determinan kemiskinan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari dimensi-dimensi kemiskinan, baik itu ekonomi (kemiskinan makro), ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar (perumahan dan permukiman), maupun kecukupan pangan pada dasarnya adalah penyebab langsung dari kondisi kemiskinan seseorang atau sekelompok orang. Ciri/kondisi yang menjadi penyebab kemiskinan ini merupakan akibat dari adanya

keputusan, kebijakan atau tindakan yang cenderung tidak mendukung penanggulangan kemiskinan. Keputusan, kebijakan maupun tindakan yang tidak adil dan cenderung tidak mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan ini terjadi karena lembaga pengambil keputusan maupun kebijakan yang belum berdaya dikarenakan lembaga ini berisi orang-orang yang tidak berdaya yang tidak memiliki paradigma yang tepat dalam memandang kemiskinan serta tidak mampu menerapkan nilai-nilai/perilaku luhur dalam memutuskan suatui kebijakan-kebijakan. Di sisi lain ketidakberdayaan lembaga pengambil keputusan/kebijakan akan semakin tumbuh subur dalam situasi di mana masyarakat secara umum memang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada gilirannya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai- nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran.

Bagan yang disajikan pada gambar 4.9 berikut akan memberikan gambaran untuk lebih memahami penyebab dan akar penyebab kemiskinan.

Gambar 4.9

Analisis Penyebab dan Akar Penyebab Kemiskinan

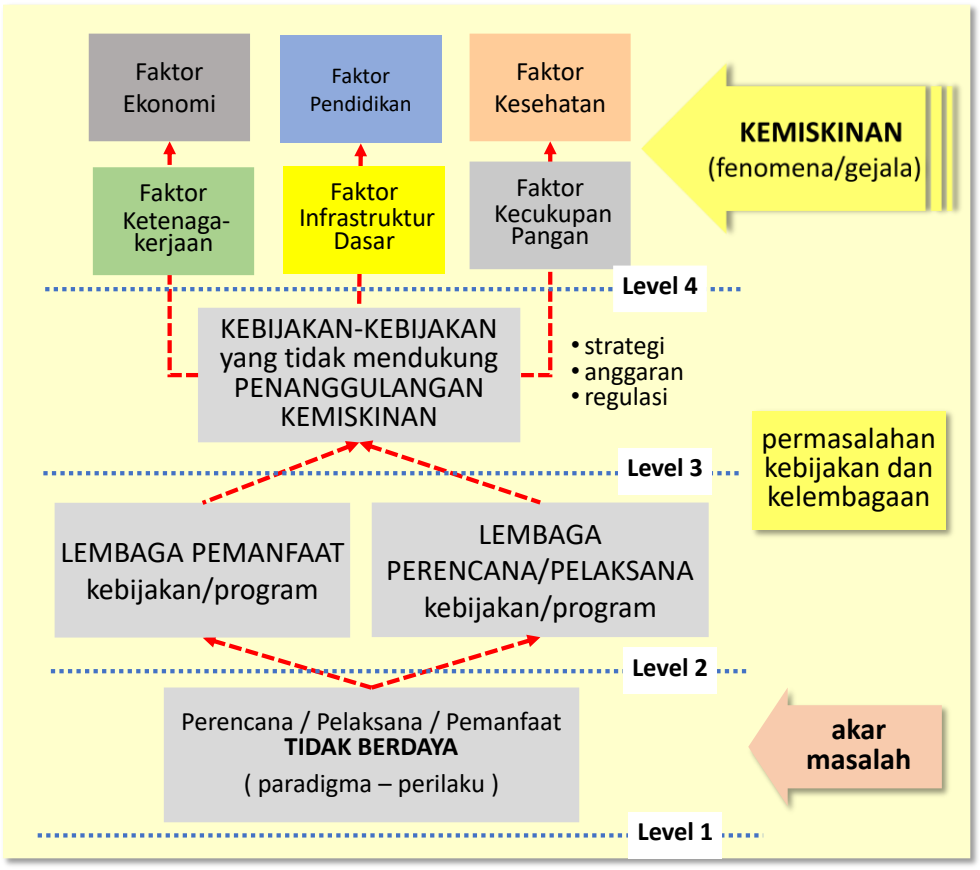

4.2. Analisis Lokasi Prioritas.

Analisis lokasi prioritas bertujuan untuk menentukan wilayah kecamatan mana yang memiliki kondisi "kritis" (daerah prioritas) yang perlu segera mendapatkan intervensi (lokus intervensi) berdasarkan kondisi atau performance indikator utama dan indikator pendukung. Analisis lokasi prioritas ini menggunakan analisis kuadran, dengan memper-sandingkan antara dua indikator yaitu indikator x dan indikator y yang memiliki keterkaitan/hubungan. Analisis ini dapat membantu dalam

menetapkan wilayah prioritas intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil diharapkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Data yang digunakan adalah data yang berasal dari BPS, dan data kemiskinan *by name by address* Kabupaten Gresik tahun 2024.

4.2.1. Rumah Tangga dan Individu Miskin.

Penentuan lokasi prioritas berdasarkan jumlah keluarga miskin dilakukan dengan menempatkan jumlah rumah tangga menurut kecamatan sebagai indikator x dan jumlah keluarga pada data kemiskinan *by name by address* Kabupaten Gresik tahun 2024 menurut kecamatan sebagai indikator y, sehingga diperoleh sebaran lokasi prioritas sebagaimana grafik yang disajikan pada gambar 4.10 berikut ini.

Pemaknaan prioritas (pada gambar 4.10) dinyatakan sebagai berikut:

Prioritas 1: Kecamatan-kecamatan yang berada di prioritas ini memiliki jumlah rumah tangga dan jumlah keluarga miskin pada data kemiskinan Kab. Gresik tahun 2024 yang sama-sama tinggi.

Prioritas 2: Kecamatan-kecamatan yang berada di prioritas ini memiliki jumlah rumah tangga yang rendah dan jumlah keluarga miskin pada data kemiskinan Kab. Gresik tahun 2024 yang tinggi.

Prioritas 3: Kecamatan-kecamatan yang berada di prioritas ini memiliki jumlah rumah yang tinggi dan keluarga miskin pada data kemiskinan Kab. Gresik tahun 2024 yang rendah.

Prioritas 4: Kecamatan-kecamatan yang berada di prioritas ini memiliki jumlah rumah tangga dan jumlah keluarga miskin pada data kemiskinan Kab. Gresik tahun 2024 yang sama-sama rendah

Gambar 4.10

Sebaran Lokasi Prioritas Keluarga Miskin menurut Kecamatan

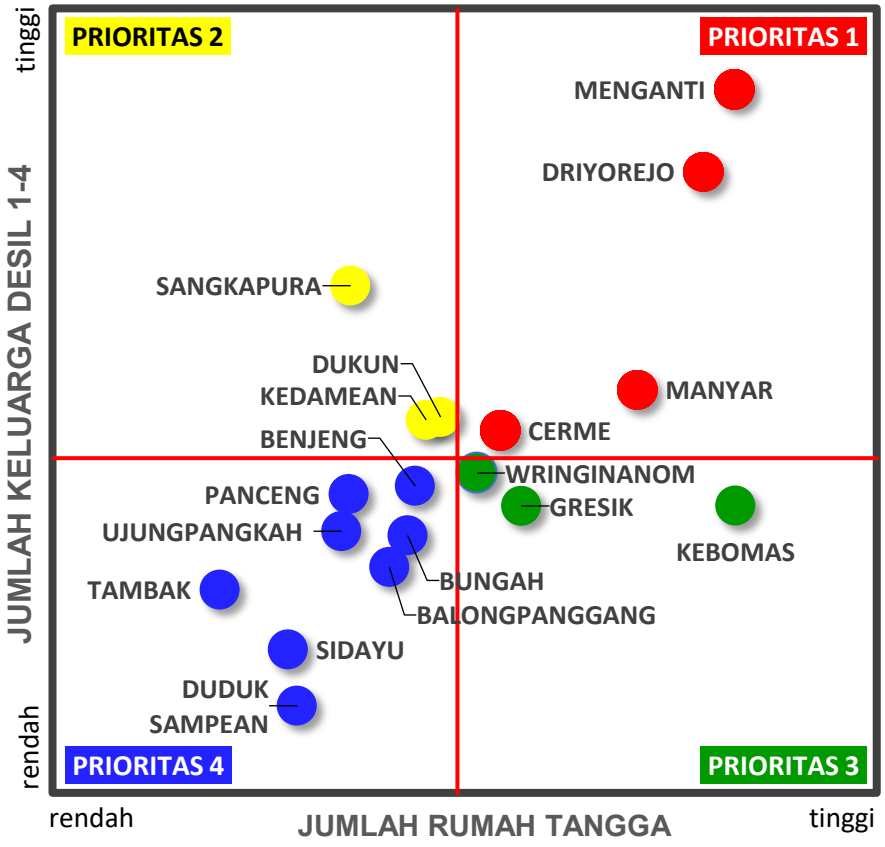

Berdasarkan gambar di atas, maka kecamatan-kecamatan sebagai:

Prioritas 1: Kecamatan Cerme, Driyorejo, Manyar, dan Menganti.

Prioritas 2: Kecamatan Dukun, Kedamean, dan Sangkapura.

Prioritas 3: Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Wringinanom.

Prioritas 4: Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Bungah, Duduk-sampean, Panceng, Sidayu, Tambak, dan Ujungpangkah.

Sebaran lokasi prioritas terhadap individu miskin dilakukan dengan menempatkan jumlah penduduk sebagai indikator *x* dan jumlah individu pada data kemiskinan *by name by address* Kabupaten Gresik tahun 2024 menurut kecamatan sebagai indikator *y*, sehingga diperoleh sebaran lokasi prioritas sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.11

Sebaran Lokasi Prioritas Individu Miskin menurut Kecamatan

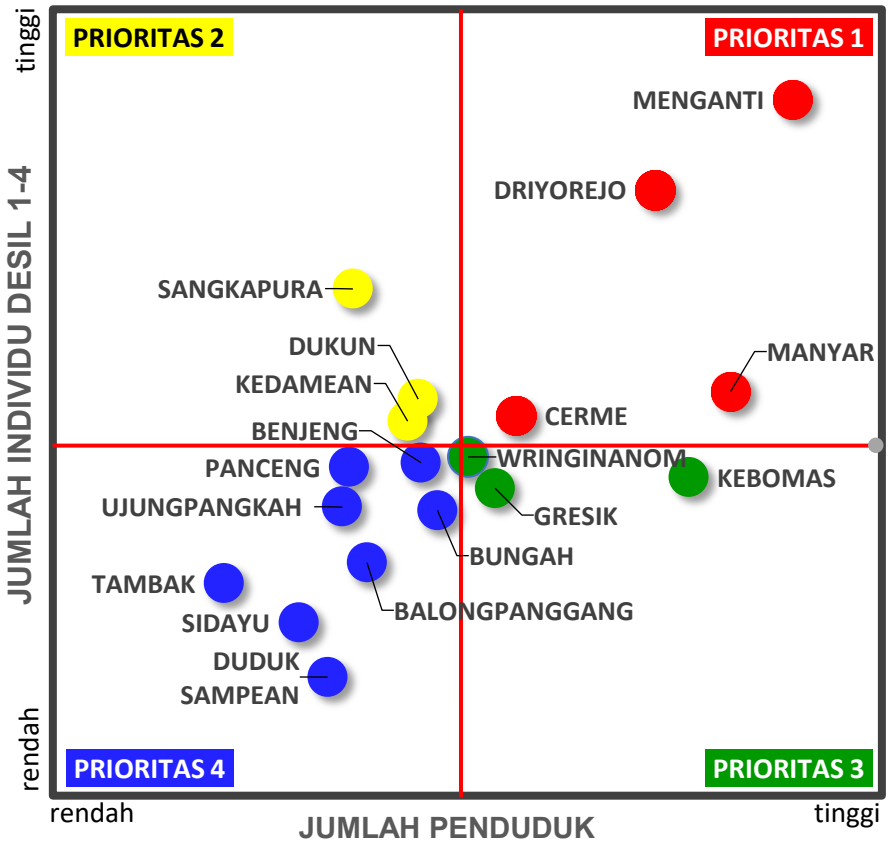

Berdasarkan gambar di atas, maka kecamatan-kecamatan sebagai:

Prioritas 1: Kecamatan Cerme, Driyorejo, Manyar, dan Menganti.

Prioritas 2: Kecamatan Dukun, Kedamean, dan Sangkapura.

Prioritas 3: Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Wringinanom.

Prioritas 4: Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Bungah, Duduk-sampean, Panceng, Sidayu, Tambak, dan Ujungpangkah.

4.2.2. Bidang-Bidang terkait Isu Kemiskinan.

Lokasi prioritas berdasarkan prioritas intervensi terhadap indikator bidang terkait isu kemiskinan memetakan lokasi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan hasil analisa prioritas masalah masing-masing indikator kemiskinan non konsumsi.

1) Bidang Pendidikan.

Sebaran lokasi prioritas bidang pendidikan menggunakan data kemiskinan *by name by address* Kabupaten Gresik tahun 2024 dengan menempatkan jumlah anak usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun sebagai indikator x dan jumlah anak usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun tidak bersekolah menurut kecamatan sebagai indikator y, sehingga diperoleh sebaran lokasi prioritas penanganan anak usia 7-12 tahun tidak bersekolah dan sebaran lokasi prioritas penanganan anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah sebagaimana disajikan pada 2 gambar berikut.

Gambar 4.12

Sebaran Lokasi Prioritas Anak Usia 7-12 Th. Tidak Bersekolah

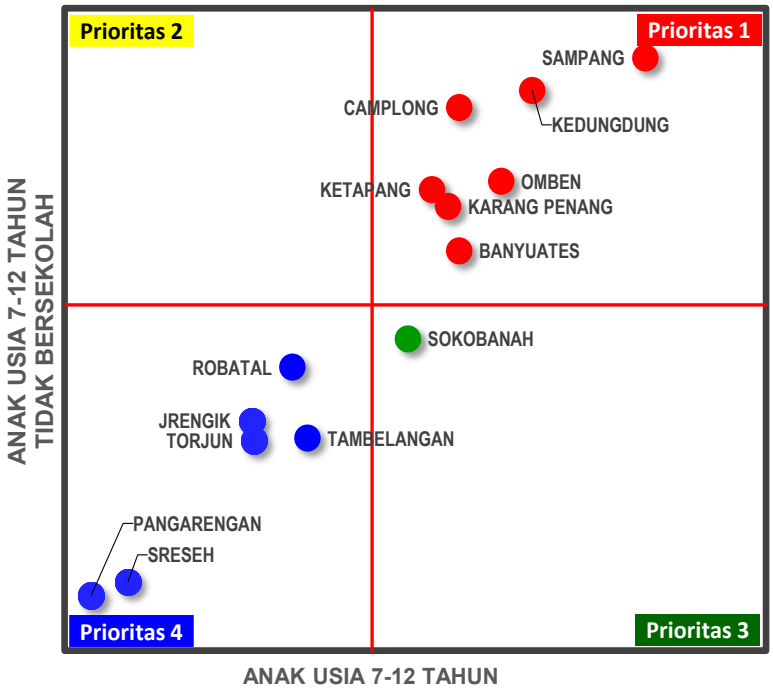

Gambar 4.13

Sebaran Lokasi Prioritas Anak Usia 13-15 Th. Tidak Bersekolah

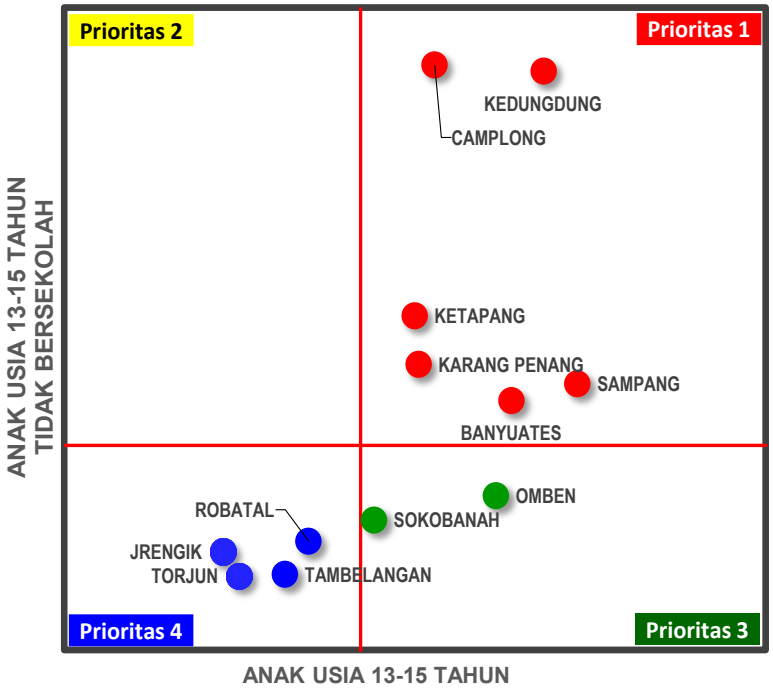

2) Bidang Kesehatan.

Sebaran lokasi prioritas bidang kesehatan dilakukan dengan menempatkan jumlah keluarga/rumah tangga miskin berdasarkan data kemiskinan *by name by address* Kabupaten Gresik tahun 2024 sebagai indikator x dan jumlah balita gizi buruk dan balita pendek (stunting) menurut kecamatan sebagai indikator y, sehingga diperoleh sebaran lokasi prioritas penanganan balita gizi buruk dan sebaran lokasi prioritas penanganan stunting sebagaimana disajikan pada 2 gambar berikut.

Gambar 4.14

Sebaran Lokasi Prioritas Balita Gizi Buruk

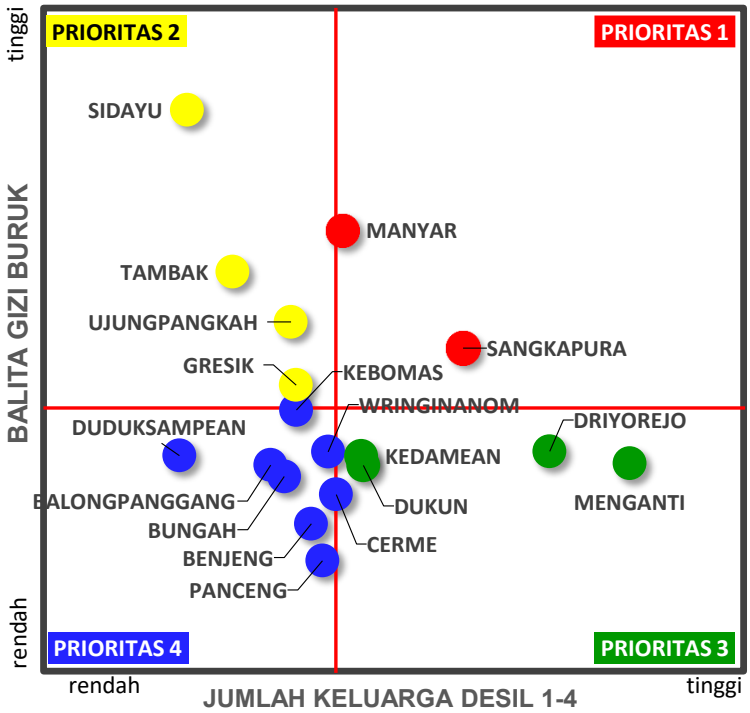

Gambar 4.15

Sebaran Lokasi Prioritas Balita Pendek (Stunting)

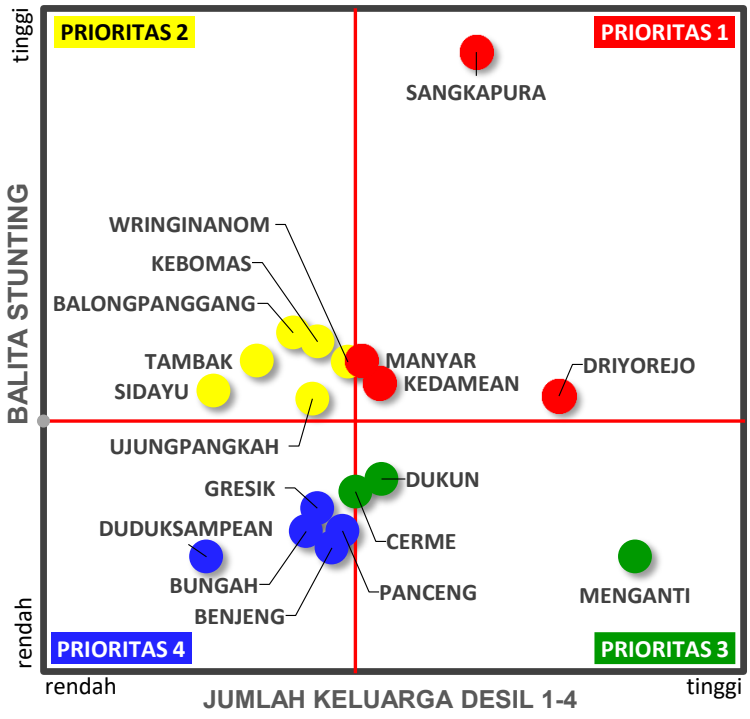

3) Bidang Ketenagakerjaan.

Sebaran lokasi prioritas bidang ketenagakerjaan menggunakan data kemiskinan *by name by address* Kabupaten Gresik tahun 2024 dengan menempatkan jumlah individu miskin (desil 1 sampai dengan desil 4) sebagai indikator x dan sejumlah data ketenaga-kerjaan menurut kecamatan sebagai indikator y, sehingga diperoleh sebaran lokasi prioritas penanganan bidang ketenagakerjaan sebagaimana disajikan pada gambar-gambar grafik kuadran berikut.

Gambar 4.16

Sebaran Lokasi Prioritas Individu Usia 15-59 Th. Tidak Bekerja

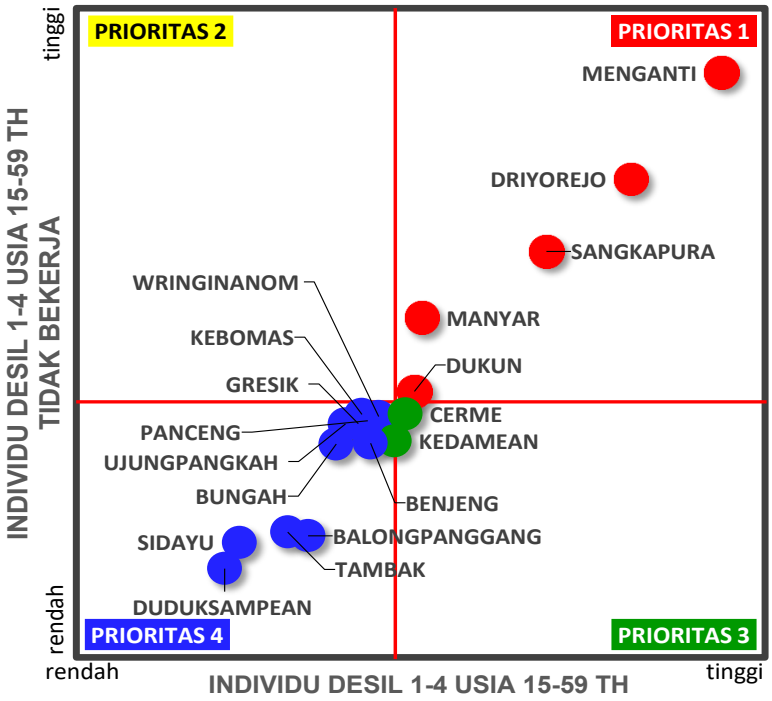

Gambar 4.17

Sebaran Lokasi Prioritas Individu Usia 15-59 Th. sbg Petani

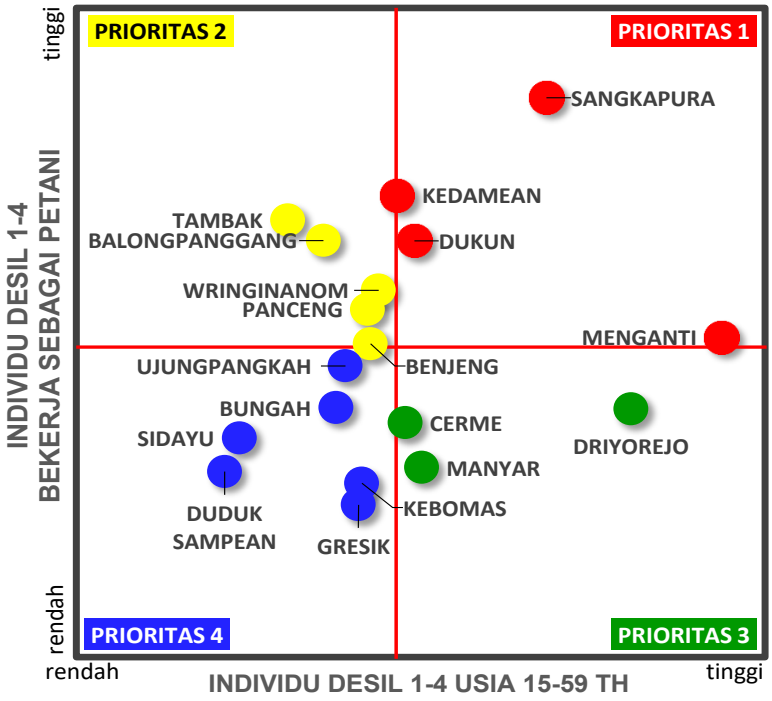

Gambar 4.18

Sebaran Lokasi Prioritas Individu Usia 15-59 Th sbg Nelayan

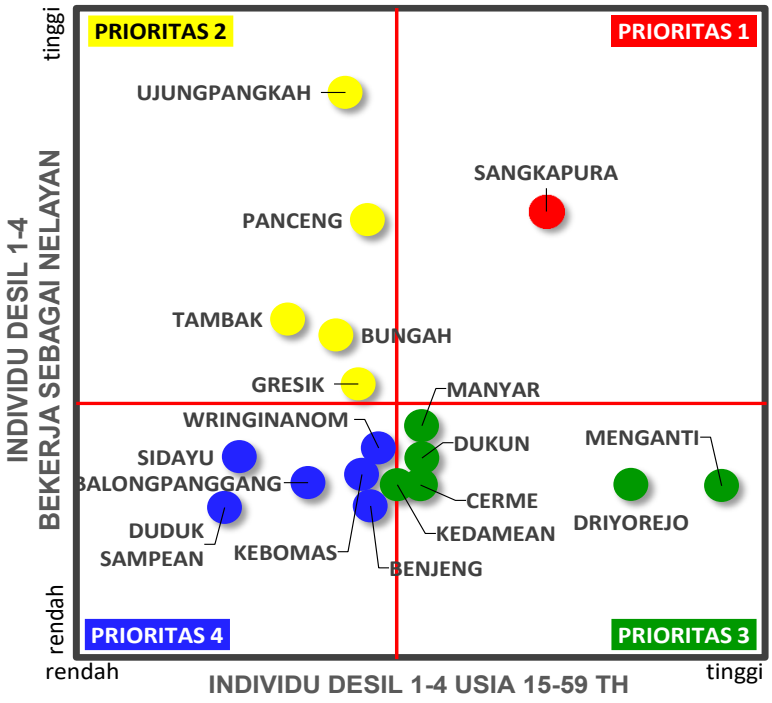

4) Bidang Infrastruktur Dasar.

Sebaran lokasi prioritas bidang infrastruktur dasar menggunakan data kemiskinan *by name by address* Kabupaten Gresik tahun 2024 dengan menempatkan jumlah keluarga miskin (desil 1 sampai dengan desil 4) sebagai indikator x dan sejumlah data info rumah menurut kecamatan sebagai indikator y, sehingga diperoleh sebaran lokasi prioritas penanganan bidang infrastruktur dasar sebagaimana disajikan pada gambar-gambar grafik kuadran berikut.

Gambar 4.19

Sebaran Lokasi Prioritas Keluarga tanpa Kepemilikan Rumah

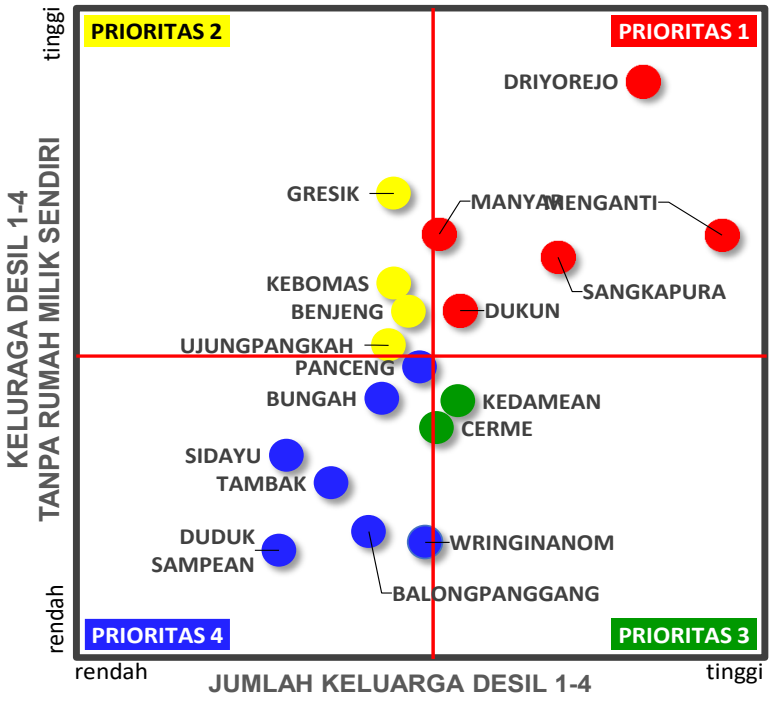

Gambar 4.20

Sebaran Lokasi Prioritas Keluarga tanpa Akses Air Minum Layak

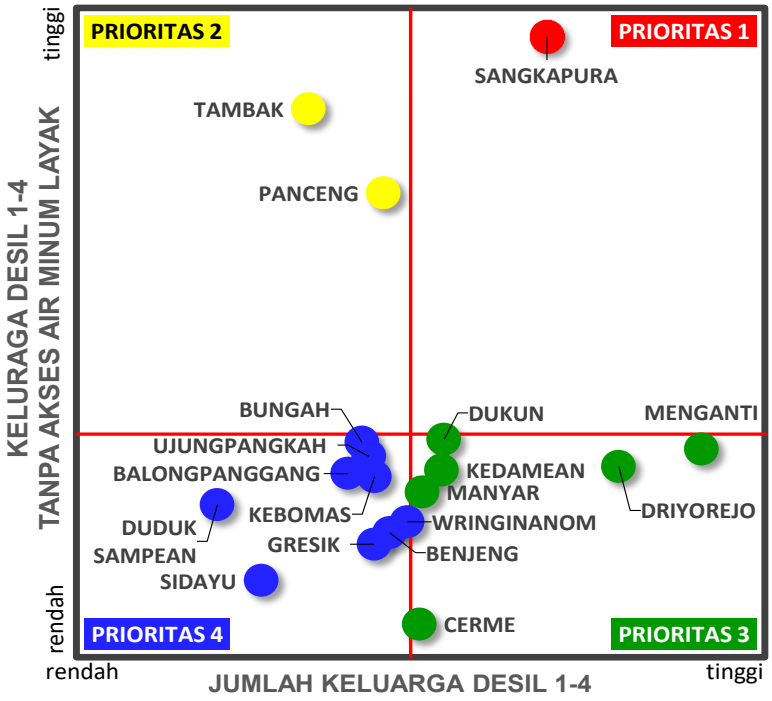

Gambar 4.21

Sebaran Lokasi Prioritas Keluarga tanpa Akses Jamban Sendiri

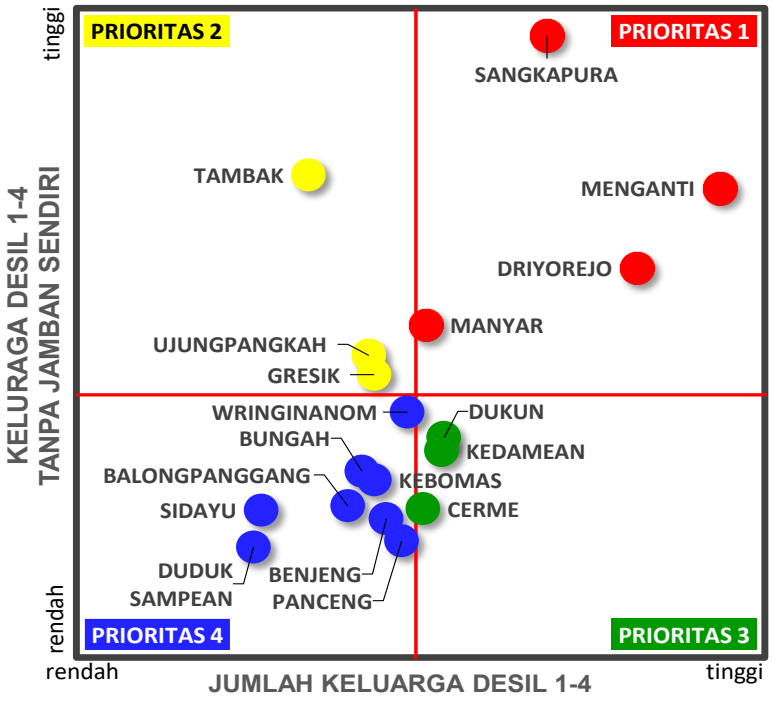

4.1. Analisis Fiskal Daerah.

1) Ruang Fiskal (*fiscal space*):

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perhitungan

ruang fiskal daerah yaitu total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaan-nya (*earmarked*), dan belanja yang sifatnya mengikat yaitu belanja pegawai dan belanja bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya.

Ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin (belanja pegawai). Idealnya porsi belanja rutin lebih kecil dari belanja modal. Memper-besar ruang fiskal daerah untuk belanja modal sangat penting karena dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat ke-bijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kon-dusif. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di daerah juga dapat mendukung terciptanya ruang fiskal.

Gambar 4.22
Perkembangan Ruang Fiskal 2021-2023
Kabupaten Gresik

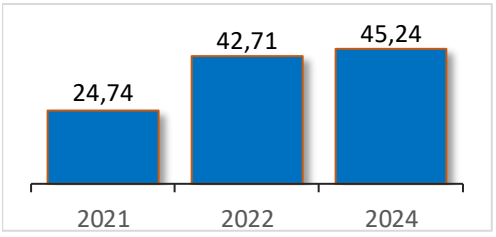

Sumber: *LRA Kabupaten Gresik, 2021-2023*

Gambar 4.22 menunjukkan bahwa meskipun terus meningkat, akan tetapi rata-rata ruang fiskal pendapatan daerah Kabupaten Gresik selama tahun 2021-2023 masih di bawah 50 persen, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Gresik tidak dapat leluasa dalam membiayai

program-program pembangunan daerah termasuk yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 4.23 menyajikan data lebih detail perkembangan ruang fiskal Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2021-2023.

Tabel 4.2
Perkembangan Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Gresik,
Tahun 2021-2023 (dalam Juta Rupiah)

Komponen	Tahun Anggaran		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Realisasi:			
❑ Pendapatan Daerah	1.431.200,00	1.880.795,20	2.018.599,68
❑ DAK	273.681,15	365.853,14	379.238,64
❑ Pendapatan Hibah	78.744,89	0,00	0,00
❑ Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
❑ Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
❑ Belanja Pegawai	724.749,44	711.717,34	726.148,56
Ruang Fiskal (%)	24,74	42,71	45,24

Sumber: *LRA Kab. Gresik – data di olah*

2) Tingkat Ketergantungan Daerah:

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan

(Derajat Otonomi Fiskal) dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan (Rasio Ketergantungan Fiskal).

Derajat Otonomi Fiskal memiliki makna yang berbalikan dengan Rasio Ketergantungan Fiskal. Semakin besar angka Derajat Otonomi Fiskal maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka Rasio Ketergantungan Fiskal, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki Derajat Otonomi Fiskal yang tinggi sekaligus Rasio Ketergantungan Fiskal yang rendah.

Grafik pada gambar 4.24 memberi gambaran Derajat Otonomi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal Kabupaten Gresik dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Rata-rata rasio Derajat Otonomi Fiskal sebesar 25,18 persen dan rata-rata Rasio Ketergantungan Fiskal sebesar 69,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Gresik masih memiliki tingkat ketergantungan daerah yang cukup tinggi. Tingginya tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Gresik tersebut disebabkan oleh rendahnya sumber-sumber PAD khususnya dari pajak daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Gambar 4.24
Perkembangan Tingkat Ketergantungan Daerah Kab. Gresik
Tahun 2021-2023 (dalam %)

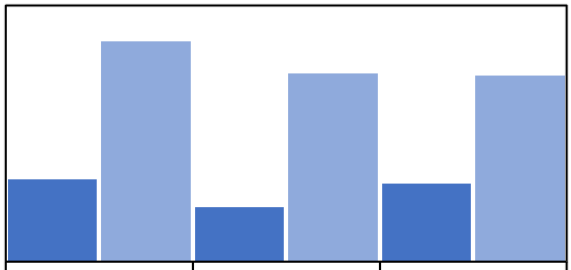

	2021	2022	2023
Derajat Otonomi Fiskal	28,91	19,17	27,45
Rasio Ketergantungan Fiskal	77,55	66,14	65,27

Sumber: *LRA Kab. Gresik – data di olah*

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah

dokumen

RPKD 2025-2029
Kabupaten Gresik

BAB V
RANCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pemahaman tentang penyebab dan akar penyebab kemiskinan sebagai-mana diuraikan pada bagian akhir analisis determinan kemiskinan (Bab 4), menjadi landasan kesadaran para pelaku penanggulangan kemiskinan memilih pendekatan dan cara dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu ke arah perubahan cara pandang utamanya para pelaku penanggulangan kemiskinan untuk bukan hanya mengambil keputusan atas dasar hukum dan bukan hanya bertindak atas dasar kewajiban, tetapi juga senantiasa mengambil keputusan dan bertindak berlandaskan pada nilai-nilai luhur universal, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Perubahan cara pandang dalam penanggulangan kemiskinan seperti ini pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan mental, sikap/perilaku masing-masing individu (persoalan individual) para pelaku penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu proses membangun kesadaran kritis melalui pembelajaran sikap/perilaku dan memulihkan mental melalui pemberdayaan moral dalam penanggulangan kemiskinan perlu ditumbuhkan secara terus menerus.

Perubahan mental, sikap, perilaku dan cara pandang para pelaku penang-gulangan kemiskinan akan menjadi pondasi bagi terbangunnya kelembagaan (institusi) penanggulangan kemiskinan yang lebih kokoh serta mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal yang lebih berorientasi kepada masyarakat miskin serta mewujudkan tata Kepemerintahan yang baik.

Gambaran penganan akar penyebab dan penyebab kemiskinan disajikan sebagaimana diagram berikut.

Gambar 5.1

Penanganan Akar Penyebab dan Penyebab Kemiskin

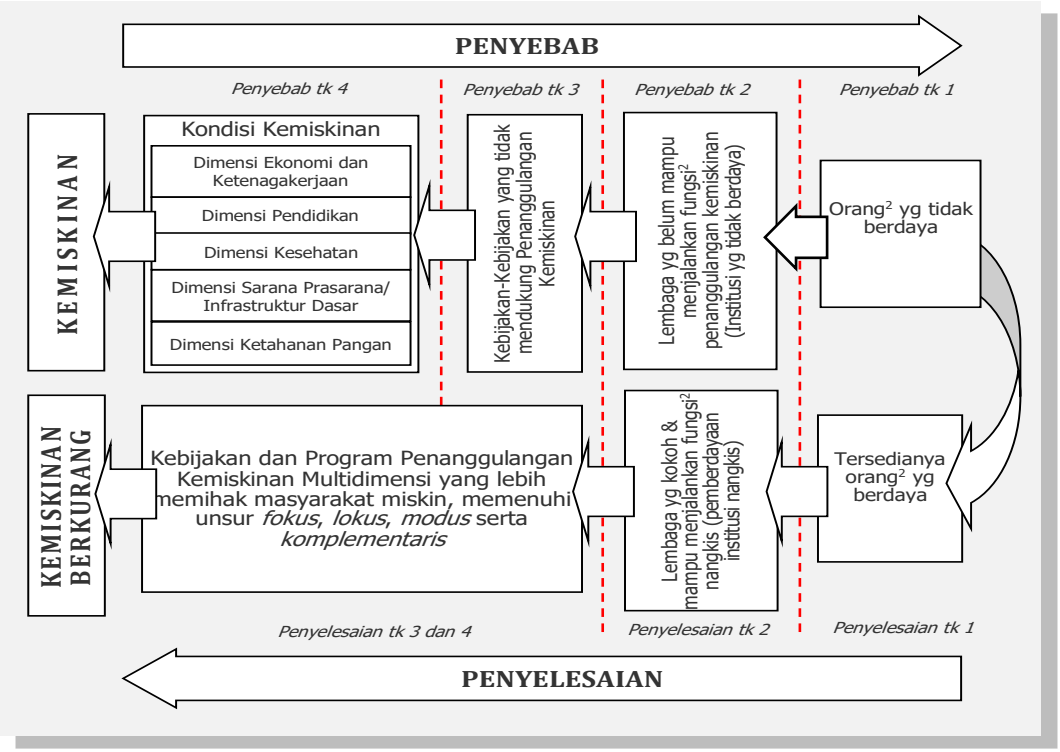

5.1. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif sekaligus sebagai tindak lanjut dari strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020, maka strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan norma pelaksanaan berupa pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara berkeadilan tanpa perbedaan, dan peningkatan status kesejahteraan rumah tangga/individu yang masih berada di bawah garis kemiskinan, dengan target capaian untuk persentase penduduk miskin (P0) berada pada angka 13,99 persen pada tahun 2029, angka pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan pada angka 2,24 persen, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi tanpa di tahun 2029 sebesar 7,10 - 7,7 persen.

5.1.1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan.

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020, adalah:

(1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
(2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
(3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
(4) sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk strategi ke satu, yaitu "*mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin*", hal mendasar yang perlu dilakukan adalah (1) penyempurnaan dan perbaikan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, (2) perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, serta (3) pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelompok. Strategi kedua dengan peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif, sedangkan pada strategi ketiga adalah dengan mengembangkan inovasi daerah program penanggulangan kemiskinan yang bernuansa pem-berdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (strategi ke empat), maka penguatan kelembagaan koordinasi

penanggulangan kemiskinan (dalam hal ini TKPK Kabupaten Gresik) adalah sebuah keniscayaan. Dua hal penting dalam penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah: (1) penguatan Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang mumpuni dalam mengelola dan menyajikan data-data kemiskinan menjadi informasi yang *up to date*; dan (2) meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (*corporate social responsibility*), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Media Massa melalui kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan model *penta helix*.

Gambar 5.2
Model Pendekatan *Penta Helix* dalam Penanggulangan Kemiskin

No	Stakeholder	Penanggung Jawab	Peran
1	Pemerintah	Pemerintah Daerah	▪ Regulasi ▪ Mediasi ▪ Fasilitasi
2	Bisnis	BUMD, BUMDes Swasta	▪ Enabler ▪ Fasilitator
3	Akademisi	Universitas	▪ Analisis ▪ Konsepsi
4	Media Massa	Media Massa	Expander
5	Komunitas	Masyarakat sipil (Ormas / Orsos)	Akselerasi

implementasi strategi penanggulangan kemiskinan membutuhkan ketersediaan data terkait dengan indikator-indikator bidang terkait isu

kemiskinan hingga tingkat kecamatan sebagai alat ukur dalam pengendalian capaian-capaian hasil kebijakan dan program yang diupayakan selama ini dan masa yang akan datang.

Lebih penting lagi adalah perlunya peneguhan komitmen untuk memanfaatkan basis data kemiskinan (data kemiskinan berbasis *by name by address*) sebagai satu-satunya data dalam perencanaan program penang-gulangan kemiskinan hingga implementasi, sehingga dapat lebih fokus pada ketepatan penerima manfaat dan fokus pada ketepatan lokasi prioritas intervensi.

5.1.2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

1) Kebijakan pemenuhan hak atas layanan pendidikan:
    1.1) Memperluas akses pendidikan untuk semua masyarakat dalam rangka pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan biaya terjangkau;
    1.2) Peningkatan kualitas hasil pendidikan (mutu lulusan);
    1.3) Peningkatan kualitas tenaga pendidik;
    1.4) Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah (pendidikan);
    1.5) Peningkatan kapasitas manajemen sekolah.
2) Kebijakan pemenuhan hak atas layanan kesehatan:

2.1) Memperluas akses kesehatan untuk semua masyarakat dengan biaya terjangkau;

2.2) Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar;

2.3) Pemenuhan kapasitas tenaga kesehatan;

2.4) Pengembangan RSUD melalui pola BLUD.

3) Kebijakan pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha:

3.1) Meningkatkan kesempatan kerja melalui pertumbuhan jumlah investor;

3.2) Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan;

3.3) Peningkatan kerjasama tripartit;

3.4) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan balai latihan kerja (BLK);

3.5) Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;

3.6) Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM serta ekonomi kreatif.

4) Kebijakan pemenuhan hak atas pangan:

4.1) Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan;

4.2) Membangun kawasan pertanian berbasis potensi wilayah;

4.3) Penganekaragaman produksi pangan;

4.4) Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang;

4.5) Peningkatan perlindungan konsumen;

4.6) Melakukan gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) berbasis teknologi informasi.

5) Kebijakan pemenuhan hak atas perumahan:

5.1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan;

5.2) Pengembangan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat;

5.3) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat.

6) Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi:

6.1) Peningkatan perlindungan terhadap sumberdaya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan sanitasi;

6.2) Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air;

6.3) Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang pengelolaan sumberdaya air dan sanitasi layak;

6.4) Pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi masya rakat miskin dan rentan yang tinggal di wilayah rawan air.

5.2. PrInsip, Pendekatan, dan Tahapan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

5.2.1. Prinsip Penanggulangan Kemiskinan.

Agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan optimal dan efektif, maka penyelenggaraan pembangunan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut:

- Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- Partisipasi. Masyarakat, khususnya masyarakat miskin terlibat secara aktif pada setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan.
- Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- Transparansi da Akuntabel. Masyarakat, khususnya masyarakat miskin, harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat

dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

- Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

5.2.2. Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari tingkat Pemerintah Kabupaten dan dari tingkat masyarakat.

Di tataran kecamatan inilah rencana pembangunan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah bertemu dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan sehingga dapat di galang perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan selaras waktu. Dengan demikian program penanggulangan kemiskinan akan menekankan

pemanfaatan Musrenbang Kecamatan sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan berbagai program pembangunan.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pendekatan atau upaya-upaya penanggulangan kemiskinan adalah pendekatan dan upaya yang berbasis masyarakat dengan:

- menggunakan data *bnba* kemiskinan sebagai data sasaran penerima manfaat program (mewujudkan satu data kemiskinan);
- menggunakan kecamatan sebagai lokus program;
- memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama Pembangunan dengan mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif;
- menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis; dan
- membangun sinergi dengan stakeholder dan seluruh operator program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang ada diwilayah Kabupaten Gresik dengan pendekatan model *penta helix*.

5.2.3. Tahapan Penanggulangan Kemiskinan.

Tahapan penanggulangan kemiskinan mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus *input – proses – output*, dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:

(1) identifikasi dan penetapan rumah tangga dan individu sasaran program; kegiatan ini pada dasarnya adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kemiskinan;

(2) pemetaan masalah prioritas dan wilayah prioritas;

(3) perancangan prioritas program penanggulangan kemiskinan;

(4) pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan

(5) evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Seluruh rangkaian tahapan kegiatan di atas adalah sebuah rangkaian kegiatan yang membentuk sebuah siklus, dimana setelah pelaksanaan kegiatan pertama diikuti dengan kegiatan kedua, ketiga dan seterusnya secara berurutan. Dan setelah kegiatan terakhir, maka kembali pada kegiatan pertama, dan seterusnya.

Gambar 5.3

Siklus Tahapan Penanggulangan Kemiskinan

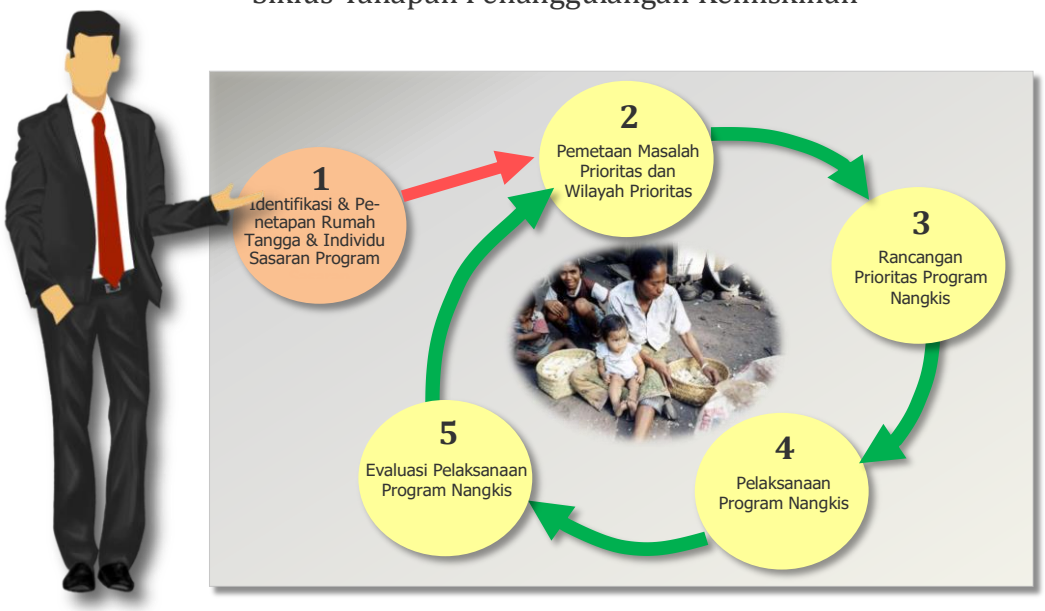

5.3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan serangkaian indikasi-indikasi program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang dapat dijadikan landasan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan gerakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik selama Tahun 2025-2029.

Tabel 5.1

Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

BIDANG URUSAN PEMERINTAH dan PROGRAM PRIORITAS		KINERJA PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp)					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01	**BIDANG PENDIDIKAN**			54.765.354.170	52.887.020.830	50.802.966.830	47.477.221.630	42.951.692.600	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	▪ Jumlah individu miskin usia 7-18 th bersekolah ▪ Jumlah pendidikan SD, SMP, PAUD dan Non Formal mendapat biaya operasional	siswa/ orang satuan pendidikan	54.765.354.170	52.887.020.830	50.802.966.830	47.477.221.630	42.951.692.600	Dindik
1.02	**BIDANG KESEHATAN**			36.753.259.440	35.167.107.000	33.455.559.840	31.265.438.452	28.285.216.730	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	▪ Jumlah ibu hamil/ber salin miskin mendapat pelayanan kesehatan ▪ Jumlah bayi/balita miskin mendapat pelayanan kesehatan ▪ Jumlah individu miskin memperoleh pelayan an kesehatan ▪ Jumlah individu miskin memperoleh program jaminan kesehatan	ibu hamil / melahirkan bayi / balita orang orang	36.328.268.240	34.760.457.000	33.068.701.140	30.903.904.852	27.958.144.530	Dinkes dan KB

Lanjutan tabel 5.1

BIDANG URUSAN PEMERINTAH dan PROGRAM PRIORITAS	KINERJA PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp)					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			424.991.200	406.650.000	386.858.700	361.533.600	327.072.200	Dinkes dan KB
1.03 **BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			96.223.275	92.070.500	87.589.600	81.855.675	74.053.200	
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	▪ Pembangunan/peningkatan kapasitas SPAM		96.223.275	92.070.500	87.589.600	81.855.675	74.053.200	Dinas PUPR
1.04 **BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			386.473.300	369.794.300	351.797.000	328.767.000	297.428.800	
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	▪ Pembangunan/rehabilitasi rumah korban bencana	unit	21.932.300	20.985.800	19.964.500	18.657.500	16.879.000	DLH, Perkim
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	▪ Perbaikan RTLH ▪ Peremajaan/pemugaran kawasan permukiman kumuh	unit unit	21.932.300	20.985.800	19.964.500	18.657.500	16.879.000	DLH, Perkim
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	▪ Perbaikan RTLH ▪ Pembgunan RLH	unit unit	109.271.500	104.555.600	99.467.000	92.955.500	84.095.000	DLH, Perkim

Lanjutan tabel 5.1

BIDANG URUSAN PEMERINTAH dan PROGRAM PRIORITAS	KINERJA PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp)					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	▪ Penyediaan infrastruktur perumahan		233.337.200	223.267.100	212.401.000	198.496.500	179.575.800	DLH, Perkim
1.06 **BIDANG SOSIAL**			6.884.851.535	7.070.934.662	7.261.849.897	7.457.919.844	7.659.283.679	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	▪ Fakir miskin yg memperoleh fasilitasi pemberdayaan sosial	orang	321.915.663	330.616.370	339.543.012	348.710.673	358.125.861	Dinsos, P3A
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	▪ Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis, PMKS menerima layanan rehabilitasi soaial	orang	774.438.875	795.370.337	816.845.336	838.900.160	861.550.464	Dinsos, P3A
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	▪ Fakir miskin dan anak terlantar terpelihara ▪ Individu/keluarga miskin ter data dan terfasilitasi bantuan sosial	orang orang	5.394.082.765	5.539.873.532	5.689.450.117	5.843.065.270	6.000.828.032	Dinsos, P3A

Lanjutan tabel 5.1

BIDANG URUSAN PEMERINTAH dan PROGRAM PRIORITAS	KINERJA PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp)					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	▪ Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yg menda pat perlindungan sosial	orang/ keluarga	394.414.232	405.074.423	416.011.432	427.243.741	438.779.322	Dinsos, P3A
2.07 **BIDANG TENAGA KERJA**			503.174.000	481.458.606	458.026.700	428.042.600	387.241.500	
2.07.03 PROGRAM PELATI HAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	▪ Individu usia kerja belum kerja menerima pelatihan kerja	orang	484.933.200	464.005.006	441.422.400	412.525.300	373.203.400	Disnaker
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	▪ Individu usia kerja belum kerja mendapat pela yanan dan indormasi kerja	orang	18.240.800	17.453.600	16.604.300	15.517.300	14.038.100	Disnaker
2.08 **BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			93.493.509	93.217.152	92.842.298	91.148.511	88.615.262	
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	▪ Persentase OPD melakukan advokasi PUG (PPRG)		29.441.912	30.237.665	31.054.000	31.054.000	31.054.000	Dinsos, P3A

Lanjutan tabel 5.1

BIDANG URUSAN PEMERINTAH dan PROGRAM PRIORITAS	KINERJA PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp)					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	▪ Persentase perempuan miskin korban kekerasan yang tertangani		33.973.500	32.507.250	30.925.200	28.900.700	26.145.900	Dinsos, P3A
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	▪ Penyediaan data gender dan anak		24.109.897	24.761.537	25.430.098	26.116.711	26.821.862	Dinsos, P3A
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	▪ Persentase pemenuhan hak anak (miskin)		5.968.200	5.710.700	5.433.000	5.077.100	4.593.500	Dinsos, P3A
2.09 **BIDANG PANGAN**			270.034.231	277.332.690	284.820.673	292.510.831	300.408.623	
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	▪ Persentase/rasio ketersediaan kebutuhan pangan		230.779.589	237.017.078	243.416.539	249.988.786	256.738.483	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	▪ Persentase cadangan pangan Kabupaten		20.178.388	20.723.767	21.283.309	21.857.958	22.448.123	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan

Lanjutan tabel 5.1

BIDANG URUSAN PEMERINTAH dan PROGRAM PRIORITAS		KINERJA PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp)					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	▪ Capaian target konsumsi pangan sesuai AKG ▪ Persentase kerawanan pangan tertangani		19.076.254	19.591.845	20.120.825	20.664.087	21.222.017	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan
2.11	**BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			755.225.000	722.827.500	687.650.000	642.632.500	581.375.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	▪ Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah		755.225.000	722.827.500	687.650.000	642.632.500	581.375.000	DLH, Perkim
2.12	**BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			321.559.257	325.148.647	328.664.808	331.421.000	332.806.054	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	▪ Individu miskin ≥17th memiliki e-KTP ▪ Keluarga ber KK ▪ Anak usia <17th ber KIA	orang keluarga anak	42.517.500	40.682.500	38.702.500	36.169.000	32.721.500	Dinas Dukcapil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	▪ Anak usia ≥17th ber akte kelahiran	anak	30.169.700	28.867.600	27.462.600	25.664.800	23.218.500	Dinas Dukcapil

Lanjutan tabel 5.1

BIDANG URUSAN PEMERINTAH dan PROGRAM PRIORITAS	KINERJA PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp)					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	▪ Hasil pengelolaan informasi administrasi kependudukan	dokumen	248.872.057	255.598.547	262.499.708	269.587.200	276.866.054	Dinas Dukcapil
2.13 **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			1.050.883.189	1.079.286.363	1.108.427.094	1.138.354.626	1.169.090.202	
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	▪ Jumlah sarana dan prasarana desa terfasilitasi	unit	369.415.051	379.399.567	389.643.355	400.163.726	410.968.147	Dinas PMD
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	▪ Jumlah kerjasama antar desa ▪ Hasil penyelenggaraan administrasi desa	desa dokumen	16.114.936	16.550.489	16.997.352	17.456.281	17.927.601	Dinas PMD
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	▪ Hasil fasilitasi tim penggerak pemberdayaan masyarakat (RT, RW, PKK, dll)	dokumen	665.353.202	683.336.307	701.786.387	720.734.619	740.194.454	Dinas PMD

Lanjutan tabel 5.1

BIDANG URUSAN PEMERINTAH dan PROGRAM PRIORITAS		KINERJA PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp)					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14	**BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			2.781.917.255	2.690.830.017	2.591.949.332	2.462.528.722	2.282.495.451	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	▪ Persentase pemenuhan data informasi keluarga		412.786.755	423.943.517	435.389.992	447.145.522	459.218.451	Dinkes, KB
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	▪ Keluarga dapat sosialisasi dan pembinaan	keluarga	1.313.076.500	1.256.408.500	1.195.260.200	1.117.014.200	1.010.540.500	Dinkes, KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	▪ Keluarga terbina dalam peningkatan keluarga sejahtera	keluarga	1.056.054.000	1.010.478.000	961.299.140	898.369.000	812.736.500	Dinkes, KB
2.17	**BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			374.448.516	384.569.075	394.952.440	405.616.156	416.567.792	
2.17.07	PROGRAM PEMBER DAYAAN USAHA MENENGAH, USA HA KECIL, DAN USA HA MIKRO (UMKM)	▪ Jumlah UMKM yg terfasilitasi kemitraan usaha	unit	332.250.154	341.230.180	350.443.395	359.905.367	369.622.812	Dinkopindag
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	▪ Jumlah UMKM yang terfasilitasi pengem-bangan dan pengolah an usaha	unit	42.198.362	43.338.895	44.509.045	45.710.789	46.944.980	Dinkopindag

Lanjutan tabel 5.1

BIDANG URUSAN PEMERINTAH dan PROGRAM PRIORITAS	KINERJA PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp)					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.25 **BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			273.605.140	281.000.115	288.587.118	296.378.970	304.381.202	
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	▪ Jumlah produksi perikanan tangkap		116.634.510	119.786.897	123.021.143	126.342.714	129.753.967	Dinas Perikanan
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	▪ Jumlah produksi perikanan budidaya ▪ Jumlah produksi garam rakyat		156.970.630	161.213.218	165.565.975	170.036.256	174.627.235	Dinas Perikanan
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	▪ Persentase hasil perikanan yg diolah		116.733.836	119.888.907	123.125.907	126.450.306	129.864.464	Dinas Perikanan
3.26 **BIDANG PARIWISATA**			34.214.600	32.737.800	31.144.660	29.105.900	26.331.500	
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMAN FAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	▪ Fasilitasi pembiayaan sertifi kasi HAKI para pelaku ekraf dari ▪ Jumlah pelaku ekraf dari mendapat Banper	orang orang	10.044.200	9.610.600	9.142.960	8.544.400	7.730.000	Disporabud par

Lanjutan tabel 5.1

BIDANG URUSAN PEMERINTAH dan PROGRAM PRIORITAS	KINERJA PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp)					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	▪ Jumlah pelaku ekraf dari yg berkembang	orang	24.170.400	23.127.200	22.001.700	20.561.500	18.601.500	Disporabud par
3.27 **BIDANG PERTANIAN**			2.595.888.586	2.542.567.548	2.483.831.104	2.402.811.447	2.284.612.488	
3.27.02 PROGRAM PENYE DIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	▪ Tersedia sarana pertanian; ▪ Pengembangan sarana pertanian	laporan laporan	1.226.095.200	1.173.180.800	1.116.083.300	1.043.020.500	943.599.800	Dinas Pertanian, KP
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	▪ Tersedia prasarana pertanian; ▪ Pengembangan prasarana pertanian	laporan laporan	533.296.400	510.281.000	485.446.200	453.667.200	410.423.600	Dinas Pertanian, KP
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	▪ Terkendalinya organisme pengganggu tanaman pangan; ▪ Tertanggulangi bencana pertanian	Ha laporan	271.381.521	278.716.395	286.241.738	293.970.265	301.907.462	Dinas Pertanian, KP
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kec. & Desa	unit	565.115.465	580.389.353	596.059.866	612.153.482	628.681.626	Dinas Pertanian, KP

Lanjutan tabel 5.1

BIDANG URUSAN PEMERINTAH dan PROGRAM PRIORITAS		KINERJA PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp)					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30	**BIDANG PERDAGANGAN**			552.547.791	567.482.001	582.804.015	598.539.723	614.700.296	
3.30.04	PROGRAM STABILI SASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	▪ terjamin ketersedaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok		552.547.791	567.482.001	582.804.015	598.539.723	614.700.296	Dinkopindag
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			1.424.454.000	1.460.011.800	1.489.035.000	1.391.557.358	1.258.913.958	
4.01.02	PROGRAM PEME RINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	▪ Persentase pelaksana an kebijakan kesejahteraan rakyat		1.424.454.000	1.460.011.800	1.489.035.000	1.391.557.358	1.258.913.958	Bagian Kesra Sekda
7.01	**KECAMATAN**			474.704.464	454.217.800	463.247.000	432.921.200	391.655.200	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	▪ Terlaksana pemberda-yaan masyarakat	kecamatan	474.704.464	454.217.800	463.247.000	432.921.200	391.655.200	Kecamatan
			JUMLAH	110.392.311.258	106.979.614.406	103.245.745.409	97.554.772.145	89.706.869.537	

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah

6 Sistem Monitoring dan Evaluasi

dokumen

RPKD 2025-2029
Kabupaten Gresik

BAB VI
SISTEM MONITORING dan EVALUASI

Untuk memastikan agar program dan kegiatan yang telah disusun mem-punyai sistem kendali dan hasil dari program dan kegiatan tersebut dapat terukur, maka perlu dibangun suatu sistem monitoring dan evaluasi. Sistem monitoring dan evaluasi dimaknai sebagai suatu sistem pengumpulan data/informasi secara reguler dan terus-menerus sehingga menghasilkan indikator-indikator perkembangan dan pencapaian suatu kebijakan dan program terhadap tujuan yang ditetapkan. Indikator-indikator tersebut diperuntukkan bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan yang ada yang sedang melaksanakan kebijakan dan program yang sedang berjalan. Sistem monitoring dan evaluasi mencakup penelusuran pelaksanaan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap target kinerja yang jelas dan konsisten, laporan kemajuan, dan identifikasi masalah. Rancangan sistem monitoring yang baik seharusnya dapat melihat apakah program dan kegiatan berjalan baik, apakah program dan kegiatan memiliki capaian sesuai ukuran-ukuran capaian (indikator), bagaimana program dan kegiatan

tersebut mempunyai hasil dan dampak yang dapat ditunjukkan dari perubahan indikator yang sudah ditentukan.

Komplementaritas monitoring dan evaluasi dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 6.1
Komplementaris Monitoring dan Evaluasi

Monitoring	Evaluasi
Memantapkan apa tujuan program	Menganalisis mengapa tujuan program (tidak) tercapai
Menghubungkan kegiatan dan sumber daya dengan tujuan program	Menelusuri secara spesifik pengaruh kegiatan terhadap hasil yang dicapai
Menerjemahkan tujuan program ke dalam indikator kinerja dan menetap-kan target	Menguji proses pelaksanaan program
Mengumpulkan data secara rutin dari indikator kinerja dan membandingkan antara capaian/realisasi dengan target	Mengkaji hasil yang tidak diharapkan (ketidaktercapaian target)
Melaporkan perkembangan program kepada pengambil keputusan, terma-suk permasalahan yang ditemukan.	Menyediakan pembelajaran, sumber potensi keberhasilan program dan rekomendasi perbaikan.

Sumber: *Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD, TNP2K*

Pemerintah Kabupaten Gresik senantiasa berupaya untuk melakukan harmonisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Gresik, dan sektor swasta. Selama ini program-

program tersebut masih dilaksanakan secara sektoral dan parsial dengan pendekatan dan prosedur yang beragam sehingga belum membuahkan hasil yang optimal dalam rangka menurunkan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Gresik. Harmonisasi, prinsip, kriteria dan prosedur melalui pengukuhan peran/fungsi TKPK dan SKPD Kabupaten Gresik. Sehingga diharapkan akan mengurangi in-efisiensi dan in-efektivitas dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan.

Pengintegrasian berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut memerlukan target dan indikator yang harus dicapai selama kurun waktu Tahun 2025-2029. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi yang secara khusus dapat melihat perkembangan pencapaian target dan indikator kebijakan dan program secara konsisten dan terbuka. Monitoring terhadap kebijakan dan kinerja program diperlukan agar dapat dilakukan evaluasi yang mendorong pengelolaan program yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan upaya penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah).

Upaya harmonisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gresik dengan formulasi koordinasi dan konsolidasinya tidak akan mungkin terlepas dari berbagai kekurangan. Untuk itu, monitoring dan tindak lanjut dari hasil-hasil monitoring sangat besar perannya dalam menyempurnakan kebijakan dan program agar

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan menurunkan angka kemiskinan dapat diwujudkan.

Agar semua pelaku kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat melakukan monitoring dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang relatif sama, maka diperlukan acuan sistem monitoring. Sistem ini berfungsi sebagai panduan monitoring, dan pelaporan program penang-gulangan kemiskinan kepada para pemangku kepentingan dari berbagai program, termasuk di dalamnya pemerintah, dan kelompok masyarakat.

6.1. **Mekanisme dan Prosedur**.

Pelaksanaan kegiatan monitoring-evaluasi di bagi dalam tiga tahapan besar kegiatan yakni:

1) Monitoring dan evaluasi dalam kerangka proses penetapan kebijakan dan program, hal ini untuk mengawal sejauh mana kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan disusun dan dirancang oleh masing-masing Perangkat Daerah betul-betul sesuai dengan Rencana Penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan serta mampu memenuhi target capaian indikator yang telah ditetapkan.

2) Monitoring dan evaluasi dalam kurun waktu implementasi kebijakan dan program, dalam tahapan ini kegiatan monitoring diseleng-

garakan terstruktur secara berkala dengan tujuan agar kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah betul-betul sesuai dengan koridor yang telah digariskan dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

3) Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu ketika kebijakan atau program telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini untuk mengukur sejauh mana capaian atau output kinerja kebijakan dan program, keberhasilan dan hambatan serta kesesuaiannya dengan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada.

Untuk maksud tersebut dipergunakan metode campuran, baik menggunakan teknik kuantitatif maupun kualitatif. Sejumlah survei (survei rumah tangga, Susenas (survei sosial ekonomi), dan studi kualitatif) dapat digunakan untuk mengukur dampak program.

Kegiatan monitoring ditempuh melalui berbagai prosedur kerja, di antara nya adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data; data dan informasi yang dikumpulkan selain berbagai indikator sosial ekonomi yang dapat memberikan pemahaman akurat tentang kondisi masyarakat miskin, juga meliputi data dan informasi kinerja kebijakan/program penanggulangan kemiskinan yang dapat memberikan gambaran

status dan pencapaian upaya pemenuhan capaian indikator utama maupun indikator per bidang/sektor yang pada gilirannya akan mencerminkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Data dan informasi yang diperlukan dalam rangka monitoring penanggulangan kemiskinan diperoleh dari:

a) Hasil laporan rutin masing-masing Perangkat Daerah pelaksana kebijakan dan pengelola program termasuk di dalamnya para konsultan pengelola program penanggulangan kemiskinan melalui masing-masing klaster program anggota TKPK;
b) Hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial maupun lembaga pengumpul data lainnya;
c) Hasil penelitian dan kajian kemiskinan partisipatif yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penelitian lainnya;
d) Hasil pemberitaan media; dan
e) Hasil laporan dari kelompok masyarakat.

2) Pelaporan; hasil kegiatan monitoring program penanggulangan kemiskinan mampu memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan dan kinerja kebijakan/program secara *objective*. Penyusunan laporan menjadi tanggungjawab semua pihak yang terlibat sebagai pelaksana atau pengelola program penang-

gulangan kemiskinan, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah, di pusat maupun di daerah. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai pihak tersebut harus diverifikasi dan dikonsolidasikan melalui Pokja dan cluster program di TKPK agar menghasilkan informasi yang akurat.

TKPK memfasilitasi kegiatan verifikasi dan konsolidasi laporan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah pengelola program maupun pihak-pihak swasta lainnya. Laporan tersebut akan disampaikan kepada forum pertemuan TKPK (yang merupakan forum lintas pelaku), sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik, untuk kemudian diambil rekomendasi kebijakan untuk menyikapinya. Selanjutnya hasil-hasil monitoring dilaporkan kepada Ketua TKPK Kabupaten dan Bupati selaku penanggungjawab. Di samping itu laporan hasil-hasil monitoring disampaikan ke berbagai OPD terkait, lembaga non pemerintah maupun lembaga donor, serta dipublikasikan pada masyarakat luas.

3) Diseminasi; hasil penanggulangan kemiskinan menjadi hak publik yang dapat diakses secara terbuka, cepat dan mudah. Oleh sebab

itu, hasil laporan penanggulangan kemiskinan perlu didesiminasi-kan kepada para pengambil keputusan, media massa dan masyarakat luas melalui berbagai saluran informasi seperti media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lain yang mudah diakses oleh publik.

4) Pemanfaatan dan Tindak Lanjut; hasil-hasil kegiatan monitoring dimanfaatkan untuk berbagai tujuan: (1) memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, (2) melakukan pengarusutamaan dan sinkronisasi berbagai kebi-jakan dan program, (3) meningkatkan keterbukaan pengelolaan program, dan (4) pertanggungjawaban publik terhadap pelaksa-naan kebijakan dan program.

Gambar 6.1
Bagan Alur Pelaporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
(sebagai bagian dari Monitoring dan Evaluasi)

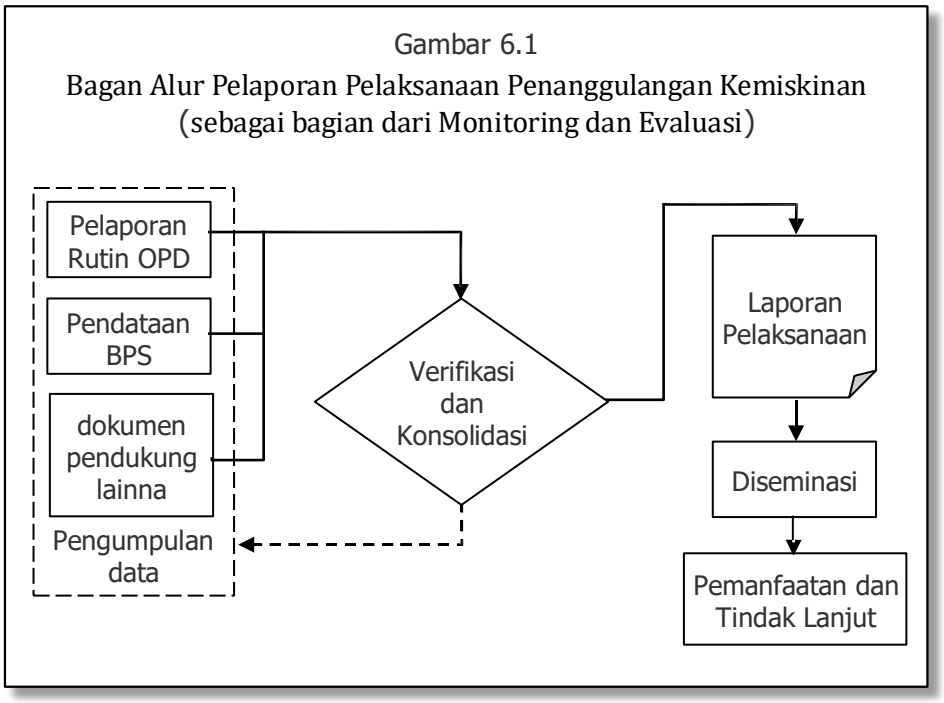

Pada tingkat pemerintahan, hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan menjadi pembahasan pada rapat koordinasi antara Bupati dengan seluruh OPD. Selanjutnya, hasil pembahasan ditindaklanjuti dalam bentuk reorientasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di tahun berikutnya.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Pelaku; adalah semua pelaku/pihak-pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gresik, dengan kata lain, pelaku pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan/program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik adalah pemantau (monitoring) bagi dirinya sendiri dan pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

2) Obyek; obyek yang dipantau (monitoring) adalah semua kegiatan/program dan kebijakan publik yang terkait dengan usaha penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik. Dalam hal ini pemantauan dilaksanakan sejak awal proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program terkait, yang dilakukan oleh seluruh stakeholder Kabupaten Gresik baik yang dilakukan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

3) Sarana; sarana pemantauan program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan adalah segenap sarana yang dimiliki oleh masing-masing pelaku. Selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan maka para pelaku dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri untuk dikompilasikan hasilnya dan dikaji bersama.

4) Metode; metode pemantauan (monitoring) yang dilaksanakan terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ditentukan oleh pemantau sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing. Misalnya kaum jurnalis melaksanakan pemantauan dengan mempergunakan kaidah jurnalistik, kalangan perguruan tinggi mempergunakan metode penelitian, pemerintah menggunakan mekanisme pelaporan dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan pemantauan hendaknya menyajikan data yang senyatanya agar dapat diambil tindakan yang tepat, terarah dan terpadu.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi antara lain:

1) Survey: mengumpulkan informasi yang relevan dari responden yang diperoleh dari sampel yang representative;

2) Metode Partisipatif: mendapatkan informasi dengan cara pelibatan secara intensif dan observasi langsung dalam kurun waktu tertentu;
3) Analisis Anggaran: menganalisis item-item pengeluaran program dan membandingkan dengan rencana awal;
4) Kunjungan Lapangan (*Spot Check*/*Rapid Appraisal*): perolehan informasi secara cepat dari penerima program dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi perlu memperhatikan setiap tahapan baik pada aspek implementasi dan aspek hasil. Perlu untuk men-definisikan kebutuhan pada setiap tahapan agar dalam pelaksanaan lebih baik.

- $Inputs$, perlu perencanaan anggaran, sumberdaya manusia dan kebutuhan lainnya yang akan terlibat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- $Activities$, mendefinisikan setiap tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia yang dilibatkan untuk melakukan hal-hal yang sudah didefinisikan sebagai input sehingga menghasilkan output yang diharapkan.
- $Outputs$, tahapan ini harus menghasilkan produk atau jasa yang bersumber dari setiap input.

- *Outcomes*, produk dan jasa yang dihasilkan harus berguna bagi pengguna dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
- *Goals*, tujuan akhir yang berdampak terhadap kondisi tertentu.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan Renstra (Rencana Strategi) dan Renja (Rencana Kerja) yang memuat target untuk setiap program yang sedang berjalan, sehingga ada kesesuaian antara aspek implementasi dan hasil.

Yang harus dibangun dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bawah payung kendali TKPK adalah:

1) Terciptanya sistem sehingga mewujud pembagian peran yang proporsional antara berbagai pihak baik di level Pemerintah mau-pun di tingkat komunitas lokal,
2) Tidak membangun struktur dan kelembagaan baru sehingga kegiatan tetap dapat dilaksanakan oleh kelompok kerja dan kelompok program yang ada dalam struktur TKPK serta satuan kerja pengelola program penanggulangan kemiskinan yang di- dalamnya terdapat konsultan pengelola program-program penang- gulangan kemiskinan, adapun dari unsur luar pemerintah, dapat dilibatkan forum-forum yang tumbuh di bawah inisiasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada,

3) Sistem yang terbangun adalah konsisten menggunakan pendekatan dan pelibatan partisipasi aktif warga masyarakat, dalam hal ini unsur masyarakat dan relawan peduli pengelola program penanggulangan kemiskinan yang ada di level komunitas desa maupun kelurahan sebagai ujung tombak keberhasilan berbagai program pemberdayaan masyarakat,

4) Penyatuan ke dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran daerah, Sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah, oleh sebab itu hasil monitoring dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan menjadi masukan penting bagi penyusunan rencana dan anggaran. Integrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan kesinambungan kebijakan/program Penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu, siklus monitoring program/kegiatan penanggulangan kemiskinan harus diselaraskan dengan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan, sehingga sistem monitoringnya menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem monev RPJMD, RKPD dan ABK (Anggaran Berbasis Kinerja). Hasil sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan harus tersedia sebelum proses perencanaan dan

penganggaran di mulai. Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan menjadi umpan balik dan pertimbangan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran, dengan itu diharapkan akan terwujud perencanaan dan penganggaran yang memiliki keberpihakkan kepada masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Gambar 6,2
Bagan Alur Pengorganisasian Monitoring dan Evaluasi

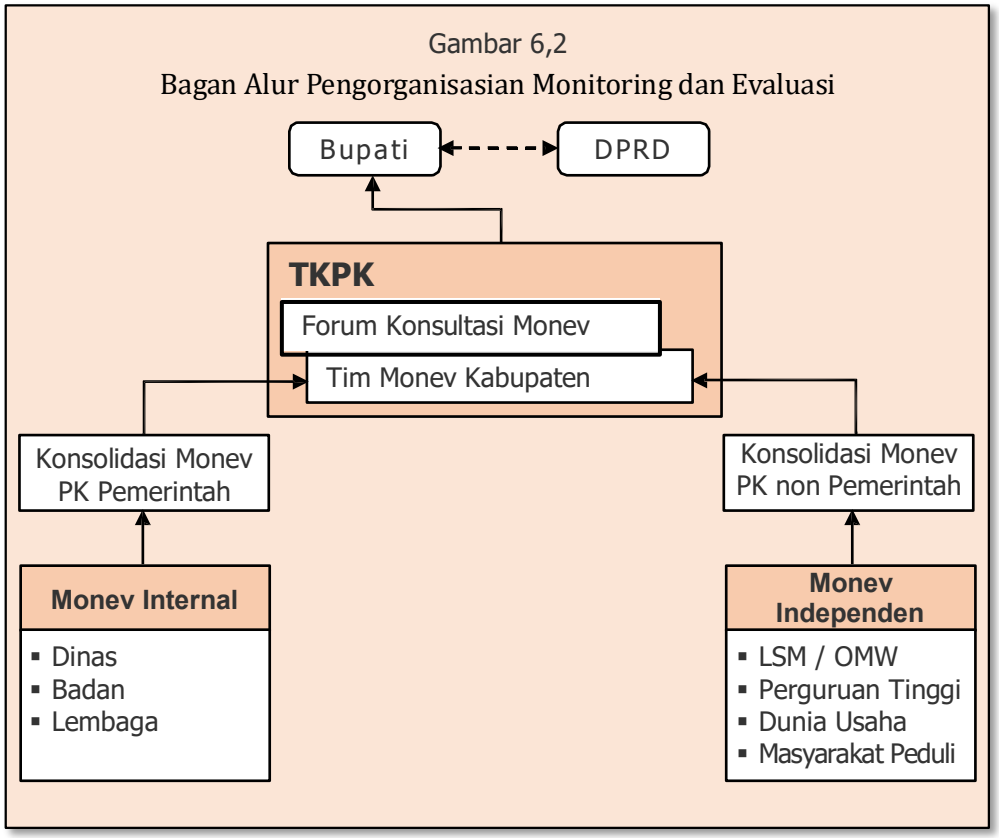

Keterangan ambar:

- Forum Konsultasi Monev *berfungsi untuk membahas dan mengkaji hasil-hasil monitoring evaluasi (monev) yang telah dikonsolidasi oleh Pokja Monev. Selanjutnya Forum menyusun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada TKPK. Forum Konsultasi Monev*

adalah sebuah forum lintas-pelaku yang terdiri dari berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Forum konsultasi meliputi semua unsur yang ada di dalam lembaga TKPK, yang lebih mengakomodasi keterlibatan unsur-unsur non pemerintah seperti perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat.

- Tim Monev *berfungsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis operasional yang meliputi: kompilasi, verifikasi dan konsolidasi hasil-hasil monev yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Hasil konsolidasi monev penanggulangan kemiskinan selanjutnya disampaikan kepada Forum Konsultasi Monev untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut. Pokja Monev dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di tingkat daerah (Kabupaten).*

6.2. **Indikator Kinerja**.

Kinerja penanggulangan kemiskinan diindikasikan oleh target pada indikator-indikator kinerja utama pada kemiskinan makro, dilihat pada 4 (empat) indikator yaitu: persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), dan indikator kemiskinan ekstrem, sebagaimana disajikan pada tabel berikutnya.

Tabel 6.2

Target Kinerja Kemiskinan Makro

Indikator	satuan	Tahun Dasar 2024	Target Capaian				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)
1. Persentase Penduduk Miskin (P0)	%	10,32	9,60	9,30	9,00	8,70	8,50
2. Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	1,58	1,30	1,10	0,98	0,96	0,94
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,33	0,20	0,15	0,10	0,05	0,05
4. Kemiskinan Ekstrem	%	0,41	<0,41	0			

6.3. **Penanganan Pengaduan Masyarakat**.

Pengaduan masalah dan pertanyaan dari masyarakat umum, pelaku program, pemerintah, kelompok peduli, dan lainnya terkait dengan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan pengaduan masyarakat prinsipnya dilakukan secara berjenjang yaitu penanganan pengaduan mulai pada tingkat yang terdekat dengan lokasi pengaduan agar penanganan dapat dilakukan sesegera dan sedekat mungkin dari lokasi pengaduan. Pengelolaan pengaduan dan masalah di masing-masing program meliputi menerima dan mendokumentasikan pengaduan dan masalah, serta memfasilitasi dan memantau penyelesaian masalah. Mekanisme pelaporan

pengaduan dan masalah menggunakan mekanisme pelaporan dari tiap program.

Pengaduan masyarakat untuk program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat disampaikan ke Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat Pusat, Sekretariat TKPK Provinsi, maupun Sekretariat TKPK Kabupaten. TKPK Kabupaten Gresik melalui Pokja (Kelompok Kerja) Pengaduan Masyarakat dapat menangani berbagai pengaduan masyarakat terkait dengan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik.

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penutup

dokumen

RPKD 2025-2029
Kabupaten Gresik

BAB VII
PENUTUP

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang mendesak dan memerlukan upaya penanganan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut perlu diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat untuk menempuh kehidupan yang bermartabat. Besar dan beratnya beban penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan kondisi dimaksud, pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyusun rumusan kebijakan tersebut dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Diharapkan dokumen RPKD ini dapat menjadi salah satu cara yang tepat dan terarah dari Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Dokumen RPKD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu dokumen RPKD ini perlu diintergrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik pada rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra OPD maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Rencana Kerja OPD.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, implementasi RPKD ini perlu dilakukan dan didukung melalui sinergitas program dan anggaran dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur DPRD, masyarakat maupun swasta.

Seluruh pemangku kepentingan perlu merespon SPKD ini dengan me-akukan hal yang sama untuk menjamin sinergitas dan implementasi serta pencapaian target penurunan angka kemiskinan sesuai dengan kewe-nangannya. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.

- Halaman ini sengaja dikosongkan -

daftar pustaka

Badan Pusat Statistik. 2011. Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial. Jakarta: BPS.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2024. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025. Gresik: Bappeda Litbang.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2024. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024-2026. Gresik: Bappeda Litbang.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2024. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045. Gresik: Bappeda Litbang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat kabupaten Gresik 2023. Gresik: BPS.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2023. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023. Gresik: BPS.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2024. Kabupaten Gresik Dalam Angka 2024. Gresik: BPS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2023. Surabaya: BPS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2023. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur – Agustus 2023. Surabaya: BPS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2023. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2019-2023. Surabaya: BPS.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. 2024. Profil Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023. Surabaya: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2024. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. Profil Kesehatan Indonesia 2023. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pemba- ngunan Nasional. 2010. Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Peren- canaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Jakarta: Bappenas.

Kurnianingsih, T., 2006, Dimensi Kemiskinan, Jakarta: Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-Setjen DPR RI.

Nasikun, 2001, Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Yogyakarta. Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND, Bandung: Alfabeta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2012, Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, cetakan pertama, September 2012, Jakarta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2014, Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD - Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, Jakarta.

Draf Final Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020.

------, https://www.bps.go.id

------, https://www.jatim.bps.go.id

------, https://www.kemdikbud.go.id

------. https://www.kemkes.go.id

------, https://www.Gresikkab.bps.go.id

------, https://www.tnp2k.go.id